



DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



FOOD
SECURITY
Kalbar Mandiri Pangan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2023

1957-2022

KALBAR

Tangguh, Tumbuh & Sejahtera



Kalbar Mandiri Pangan



DisketPangan Prov Kalbar



disketpangan@kalbarprov.go.id



www.disketpangan.kalbarprov.go.id



Jl. Adi Sucipto No. 48



Foody

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dapat disusun sesuai dengan peraturan dan ketentuan.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat merupakan Dokumen Perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah bidang pangan yang disusun berpedoman pada RPJMD Perubahan dan bersifat indikatif dan melakukan penyesuaian indikator pada sub kegiatan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam rangka pengendalian, maka indikator dan target kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran OPD, akan menjadi ukuran kinerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu, indikator dan target disusun berbasis data kinerja pada periode-periode sebelumnya, serta dengan mengedepankan transparansi, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Renstra ini disusun dalam dukungan dan panduan pimpinan daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalbar dan telah didiskusikan di internal Perangkat Daerah dalam rapat dan diskusi. Oleh karena itu, segala kekurangan dalam Renstra Perubahan ini, dikemudian hari akan menjadi kajian dan evaluasi lebih lanjut dan disampaikan kepada pimpinan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Semoga Allah SWT meridhoi niat dan kerja kita.

Pontianak, Januari 2022



Daftar Isi

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Sistematika	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	6
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
B. Sumber Daya	11
C. Kinerja Pelayanan	14
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	36
B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37
C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	42
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD	52
E. Penentuan Isu-isu Strategis	56
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN	
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	58
B. Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD	62
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	65
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	66
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
A. Rumusan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Pangan dan Pertanian-Peternakan	78
B. Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	79
BAB VIII PENUTUP	81

Daftar Gambar

	Hal.
1.1. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dan Renstra PD	1
2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat	11
2.2. Indeks Ketahanan Pangan beserta tiga indeks pembentuknya tahun 2019-2021	19
2.3. Perkembangan Skor PPH 2016-2020 berdasarkan konsumsi langsung Rumah Tangga (data actual) dan Penggunaan Standar AKG 2.100 kkal/kapita/hari	20
2.4. Tingkat Konsumsi Energi dan Protein per kabupaten/kota Tahun 2020	21
2.5. Konsumsi Beras per Kabupaten/Kota Tahun 2021	23
2.6. Proporsi Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak Nabati dan Hewani Tahun 2020	24
2.7. Kebutuhan, Keterdiaan dan Penguatan CP Kabupaten/Kota Tahun 2021	27
2.8. Perkembangan PoU Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020	31
2.10. Update Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Level Kecamatan Tahun 2020	32
2.11. IKP Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020	33

Daftar Tabel

		Hal.
2.1	Rekap Data Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2021	13
2.2	Rekap Aset/ Barang Milik Daerah sampai dengan 31 Desember 2021	15
2.3	Alokasi Anggaran pada Program Prioritas Tahun 2018-2021	16
2.4	Perkembangan Realisasi Indikator Tujuan dan Sasaran Ketahanan Pangan 2018-2021	18
2.5	Pola Konsumsi Pangan Masyarakat 2018-2020 berdasarkan kelompok Pangan	21
2.6	Gambaran Pola Konsumsi Pangan Masyarakat per Kabupaten/Kota Tahun 2020	22
2.7	Neraca Bahan Makanan Tahun 2021	23
2.8	Keragaman Ketersediaan Pangan per Kelompok Pangan Tahun 2020	25
2.9	Ketersediaan dan Kebutuhan bahan pangan tahun 2021	26
2.10	Harga rata-rata beras medium tahun 2021 di tingkat konsumen	28
2.11	Keragaman Harga Pangan Pokok/ Pangan Lainnya tingkat Konsumen Tahun 2021	29
2.12	Sebaran Kecamatan pada per Kategori Tahan dan Rentan Pangan Tahun 2020	32
2.13	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Tahun 2020	30
3.1	Pemetaan Permasalahan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat	39
3.2	Pemetaan Fungsi pada Dinas Pangan	50
3.3	Telaahan RTRW Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat	56
3.4	Pola Ruang Wilayah pada Program Dinas Kehanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat	57
3.5	Telaahan KLHS pada permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar	58
4.1	Matriks Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	64
4.2	Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Restra PD	67
5.1	Matriks hubungan tujuan OPD, Strategi dan Arah Kebijakan	68
6.1	Program dan Kegiatan dan Indikasi Pendanaan 2018-2023 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023	70
7.1	Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian 2019-2023 Dinas Ketahanan Pangan	79
7.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan dan Target Capaian 2019-2023 Dinas Ketahanan Pangan	79
7.3	Indikator Sasaran PD dan Target Capaian 2019-2023 Dinas Ketahanan Pangan	80



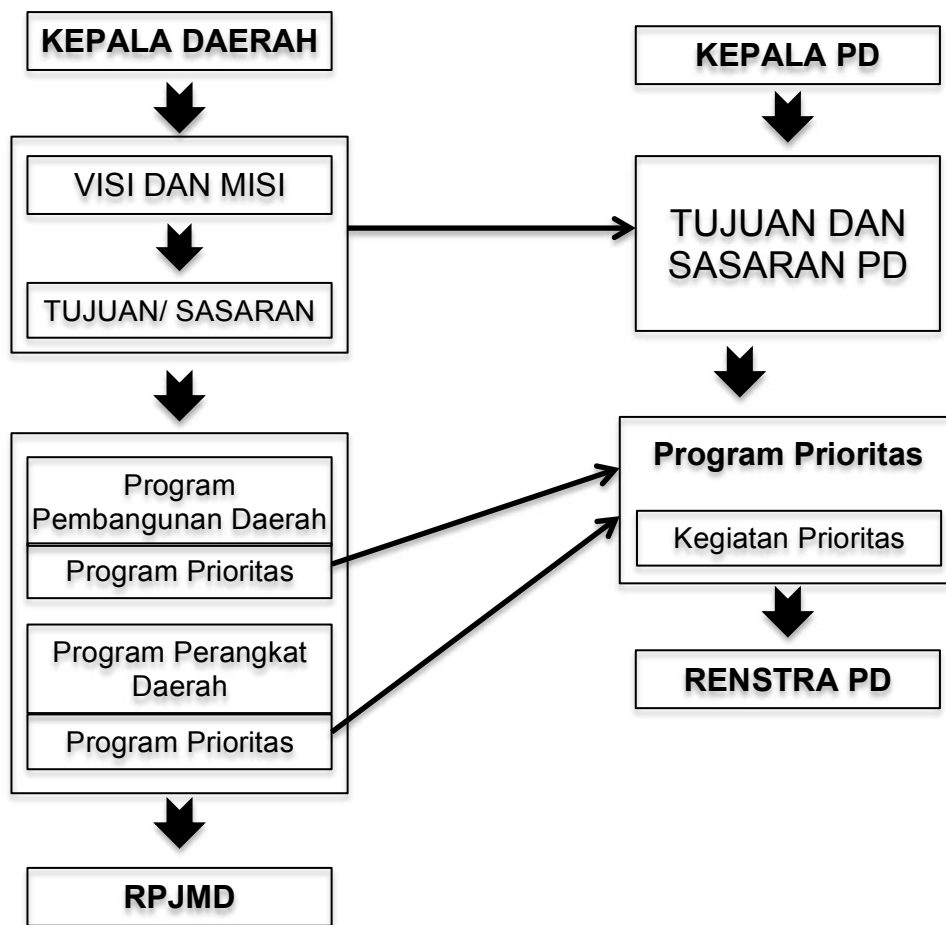
A. Latar Belakang

**BAB 1.
PENDAHULUAN**

Periode pembangunan daerah tahun 2018-2023 merupakan periode keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat 2005-2025 dan tahun penyalarsan Periode keempat Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi dan program Gubernur, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah.

Adapun hubungan antara Dokumen RPJMD dan Renstra sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dan Renstra PD



Selama periode RPJMD dan Renstra telah terjadi perubahan kebijakan Nasional, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun



2020-2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Nasional Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, dan merujuk kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, maka perlu melakukan penyempurnaan pada Indikator dan Target Sub Kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perubahan Dokumen Renstra dalam hal apabilandilakukan perubahan RPJMD dan tahapan penyusunan Dokumen Renstra mutatis mutandis dengan tahapan penyusunan Renstra OPD.

Berdasarkan : (1) Perubahan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023; (2) Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; dan (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.

B. Landasan Hukum

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9



- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang;
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Pengelolaan Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Keuangan;
 16. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Zoonosis;
 17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
 18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Laporan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah;



26. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
27. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2024;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
31. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat;

C. Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang pangan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuan dari penyusunannya adalah :

1. Menjabarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di Bidang Pangan.
2. Menjadi Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para Pihak yang terkait dalam upaya pembangunan ketahanan pangan.
4. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat.

D. Sistematika

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi



setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Oleh karena itu, Sistematika penyajian Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Sistematika
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN
 - A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
 - B. Sumber Daya
 - C. Kinerja Pelayanan
 - Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
 - A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
 - B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
 - D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD
 - E. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN
 - A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
 - B. Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII. PENUTUP



A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

BAB 2. **GAMBARAN** **PELAYANAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, maka Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dijelaskan sebagai berikut:

Tugas dan Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan program kerja di bidang Ketahanan pangan Ketahanan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan;
- g. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- h. Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas;
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan.



Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepala Dinas adalah : (a) penetapan program kerja di bidang ketahanan; (b) perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (c) penyelenggaraan kegiatan di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan; (e) pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (f) pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; (g) pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan dinas; (h) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan; (i) pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan; (j) pemberian saran dan pertimbangan kepada gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan (k) pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset, umum dan administrasi kepegawaian serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi : (a) penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan; (b) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur; (c) penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan



dan aset di Lingkungan Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan; (d) pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset; (e) pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas; (f) penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas; (g) pelaporan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan dinas; (h) pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat; (i) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan; (j) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; (k) pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat membawahi sub Bagian Umum dan Aparatur yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur.

Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, sumber daya pangan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Ketersediaan dan sumber daya pangan.

Fungsi dari Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan adalah sebagai berikut: (a) penyusunan program kerja di bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan; (b) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, dan sumber daya pangan; (c) penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, dan sumber daya pangan; (d) pengkajian, penyusunan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi infrastruktur pangan di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan; (e) pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, dan sumber daya pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (f) pengorganisasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, dan sumber daya pangan; (g) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, dan sumber daya pangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (h) pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, dan sumber daya pangan; (i) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, dan sumber daya pangan; (j) pelaksanaan fungsi lain di bidang ketersediaan dan distribusi pangan yang



diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, dan sumber daya pangan sesuai ketentuan dan perundang-undangan.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang distribusi dan harga pangan, cadangan pangan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.

Fungsi dari Bidang distribusi dan cadangan pangan adalah sebagai berikut: (a) penyusunan program kerja di bidang distribusi dan cadangan Pangan; (b) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang distribusi dan harga Pangan, dan cadangan pangan; (c) penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang distribusi dan harga Pangan, dan cadangan pangan; (d) pengkajian, penyusunan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi infrastruktur pangan di bidang distribusi dan cadangan pangan; (e) pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang distribusi dan harga Pangan, dan cadangan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (f) pengorganisasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang distribusi dan harga Pangan, dan cadangan pangan; (g) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang distribusi dan harga Pangan, dan cadangan pangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (h) pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang distribusi dan harga Pangan, dan cadangan pangan; (i) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang distribusi dan harga Pangan, dan cadangan pangan; (j) pelaksanaan fungsi lain di bidang distribusi dan dan cadangan pangan yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang distribusi dan harga Pangan, dan cadangan pangan sesuai ketentuan dan perundang-undangan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Konsumsi dan penganekaragaman pangan, serta keamanan pangan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Fungsi dari Bidang Konsumsi dan keamanan pangan adalah sebagai berikut: (a) penyusunan program kerja di bidang Konsumsi dan keamanan Pangan; (b) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang Konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan; (c) penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan; (d) pengkajian, penyusunan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi infrastruktur pangan di bidang Konsumsi dan dan keamanan pangan;



(e) pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (f) pengorganisasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang Konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan; (g) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (h) pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan; (i) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang distribusi dan harga Pangan, dan cadangan pangan; (j) pelaksanaan fungsi lain di bidang Konsumsi dan keamanan pangan yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan sesuai ketentuan dan perundang-undangan.

Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

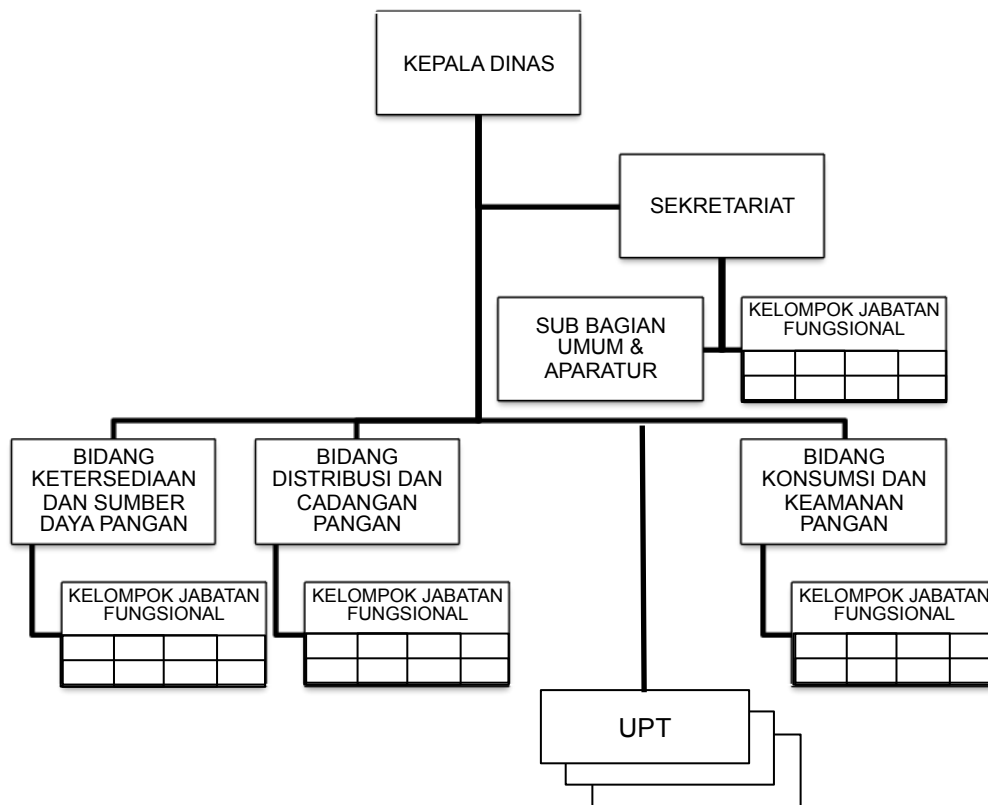
Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat, maka susunan organisasi Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan;
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- f. Unit Pelayanan Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagan Struktur Perangkat Daerah ditunjukkan pada Gambar berikut:



Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat

B. Sumber Daya

Untuk mendapatkan dukungan kondisi yang diinginkan, indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan pangan, peternakan dan kesehatan hewan yang bersifat partisipatif;
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatkan sinergitas antara aspek-aspek pembangunan ketahanan pangan baik aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan;
6. Koordinasi lintas sektoral



Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka mencapai target Kinerja Daerah bidang pangan di Kalimantan Barat sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur, sarana dan prasarana kerja, sumber pendanaan dan lain-lain.



B.1. Sumber Daya Aparatur

Tabel 2.1 Rekap Data Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 per 31 Desember 2021

Sekretariat/ Bidang	Tingkat Pendidikan (Setara)								Golongan										Jlh
	S2/ S3	S1/ D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	<SLTP	IV-c	IV-b	IV-a	III-d	III-c	III-b	III-a	II-d	II-c	< II-c	
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Eselon II	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sekretariat	3	12	0	0	0	6	2	0	0	0	2	5	4	3	1	2	2	4	23
Eselon III	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Eselon IV	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Fungsional Analis Kebijakan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Fungsional Umum	1	11	-	-	-	6	2	-	-	-	-	4	4	3	1	2	2	4	20
Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan	3	4	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	1	0	0	0	7
Eselon III	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Analisis Ketahanan Pangan	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Fungsional Umum	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	4
Bidang distribusi dan cadangan Pangan	2	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	0	0	0	0	0	7
Eselon III	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Analisis Ketahanan Pangan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Analisis Harga Pasar	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Fungsional Umum	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	4



Sekretariat/ Bidang	Tingkat Pendidikan (Setara)								Golongan										Jlh
	S2/ S3	S1/ D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	<SLTP	IV-c	IV-b	IV-a	III-d	III-c	III-b	III-a	II-d	II-c	< II-c	
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	2	3	0	0	0	4	0	0	0	1	1	1	2	4	0	0	0	0	9
Eselon III	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Analisis Ketahanan Pangan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Pengawas Mutu Hasil Pertanian	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Fungsional Umum	-	2	-	-	-	4	-	-				-	2	4	-	-	-	-	6
TOTAL	11	24	0	0	0	10	2	0	1	3	6	13	7	7	2	2	2	4	47



B.2. Sarana dan Prasarana

Dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kelancaran dalam penyelenggaraan tugas operasional, Dinas Pangan Provinsi Kalimantan Barat dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung kerja, baik berupa barang tidak bergerak (gedung/kantor, ruang pertemuan, garasi, komputer, audio visual, perlengkapan internet, brankas, dan lain-lain) dan barang bergerak (sarana mobilitas/kendaraan).

Rekap asset/ Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas Pangan sampai dengan 31 Desember 2021 ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Rekap Aset/ Barang Milik Daerah sampai dengan 31 Mei 2021

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Volume	Satuan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Aset Tanah	2	Sertifikat	11.632.219,51	11.632.219,51
2	Aset Peralatan dan Mesin - Intracomptable - Extracomptable	877	item item	5.135.938.601	335.217.958
3	Aset Gedung dan Bangunan	20	unit	3.893.791.751,85	2.731.594.218,85
4	Aset lain-Lain Aset Tetap Lainnya		item		
5	Aset Tidak Berwujud		item		
	Aset jalan, Jaringan dan irigasi	5	item	1.163.028.580	583.663.763

Secara umum, jenis asset yang dikelola dan dimanfaatkan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Gedung Kantor Dinas
- 2) Kendaraan Roda 4
- 3) Kendaraan Roda 2
- 4) Komputer
- 5) Laptop
- 6) Mebel
- 7) Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga.

B.4. Sumber Daya Anggaran

Sumber Daya Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program prioritas pada tahun 2018 sampai dengan 2021 ditunjukkan pada Tabel 2.3.



Tabel 2.3 Alokasi Anggaran pada Program Prioritas Tahun 2018-2021.

NO	URAIAN	Pagu (Rp)			
		2018	2019	2020	2021
	DPPKH Kalbar	15.362.036.100	10.948.988.296	22.730.541.691	16.308.768.859
1	Urusan Pangan	5.734.814.650	4.863.776.500	3.170.787.500	16.308.768.859
	- Program Peningkatan Ketahanan Pangan	5.734.814.650	4.863.776.500	3.170.787.500	
	- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	-	-	-	5.844.996.691
	- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	-	-	-	4.034.935.674
	- Program Penanganan Kerawanan Pangan	-	-	-	115.852.500
	- Program Pengawasan Keamanan Pangan	-	-	-	349.780.566
	- Penunjang Pemerintah Daerah	-	-	-	5.963.203.428

B.3. Sumber Daya Lainnya

Sumberdaya pendukung lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah pembiayaan yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan tugas, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 bahwa untuk menjalankan wewenang ketahanan pangan didukung oleh pembiayaan dari tingkat pusat maupun daerah.

C. Kinerja Pelayanan

C.1. Kinerja Pelayanan Urusan Wajib bidang pangan

Satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dari satu sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat yang dirumuskan untuk mendukung 1 indikator Tujuan Gubernur Kalimantan Barat. Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018-2023 sebelum perubahan ditunjukkan pada Tabel 2.4.

Sejalan dengan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari tiga tujuan dengan satu indikator kinerja, dan satu sasaran dengan satu indikator kinerja. Dengan tujuan dan sasaran tersebut, maka indikator kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka



melaksanakan urusan pemerintah bidang pangan dan didukung dengan program penunjang untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan sesuai dengan target kinerja yang dirumuskan.



Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi Indikator Tujuan dan Sasaran Ketahanan Pangan 2018-2021

NO.	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI				CAPAIAN (%)		
					2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan		Indeks Ketahanan Pangan Provinsi	Skor	55,17	56,79	57,69	59,04	60,91	-	55,17	71,13	71,32	100,00	125,25	123,63
		Terjaminnya kecukupan pangan masyarakat yang beragam secara mandiri dan berbasis sumber daya lokal	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	75,66	77,53	79,4	81,27	83,13	74,81	76,25	76,4	81,1	100,78	98,54	102,14
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Skor	-	-	B	B	BB	-	-	C	B	-	71,43	100
			Nilai SAKIP OPD	Skor	-	-	BB (75,00)	BB (75,00)	A (80,00)	-	-	BB (75,70)	BB (75,74)	-	100,93	100,99

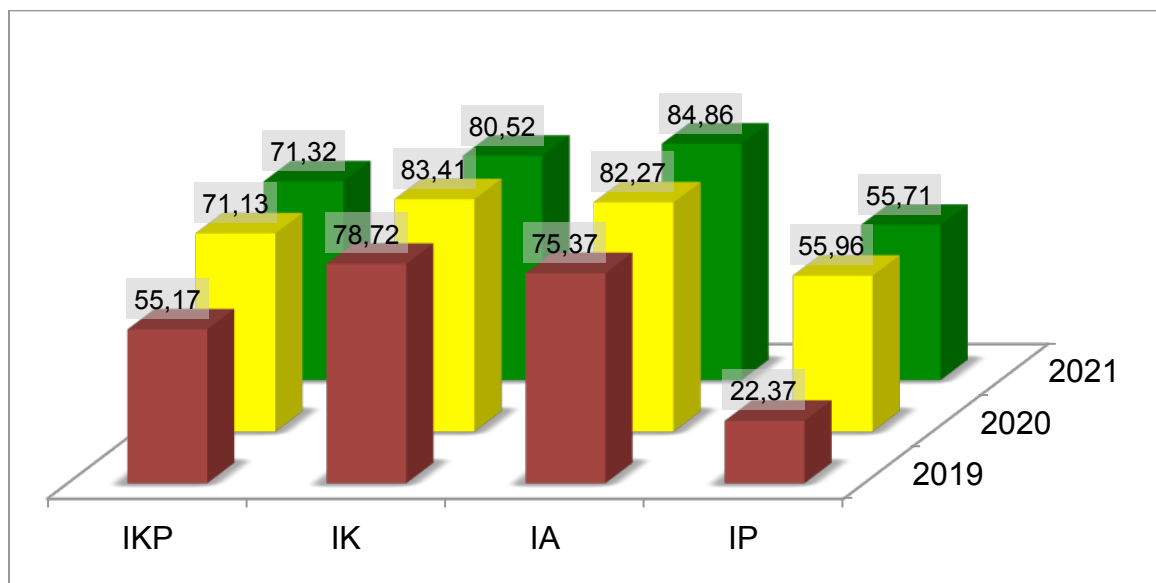


Urusan Pemerintah Bidang Pangan

Urusan pemerintah bidang pangan ditujukan untuk membangun ketahanan pangan daerah. Ketahanan pangan merupakan satu kesatuan dari sub sistem ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Oleh karena itu, indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Daerah mencerminkan komposit dari kondisi ketahanan pangan daerah, yakni: a) Indeks Ketersediaan Pangan; b) Indeks Keterjangkauan Pangan; dan c) Indeks Pemanfaatan Pangan.

Penilaian menggunakan IKP mempunyai nilai strategis untuk mengevaluasi ketahanan pangan dan gizi daerah dan memberikan gambaran peringkat ketahanan pangan antar provinsi/kabupaten/kota. Indeks Ketahanan Pangan dapat membantu daerah menentukan prioritas daerah dan intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah.

Penggunaan Indeks Ketahanan Pangan tingkat provinsi baru digunakan pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019, IKP Kalbar berada di urutan ke 30 dengan skor 55,17 dan meningkat ke urutan 23 pada tahun 2020 dengan skor 71,13. Capaian skor untuk setiap Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut: a) Indeks Ketersediaan Pangan dari 78,72 meningkat menjadi 83,41; b) Indeks Keterjangkauan Pangan meningkat dari 75,37 menjadi 82,27; dan c) Indeks Pemanfaatan Pangan yang meningkat sangat signifikan dari 22,37 menjadi 55,96. Di tahun 2021, berdasarkan hasilolahan sementara badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, IKP Kalimantan Barat mencapai 71,32.



Gambar 2.2. Indeks Ketahanan Pangan beserta tiga indeks pembentuknya pada Tahun 2019-2021

Pembangunan ketahanan pangan daerah menysar meningkatnya kualitas hidup manusia yang sangat ditentukan dari kualitas asupan pangan penduduk. Pangan yang berkualitas adalah pangan yang memenuhi keragaman

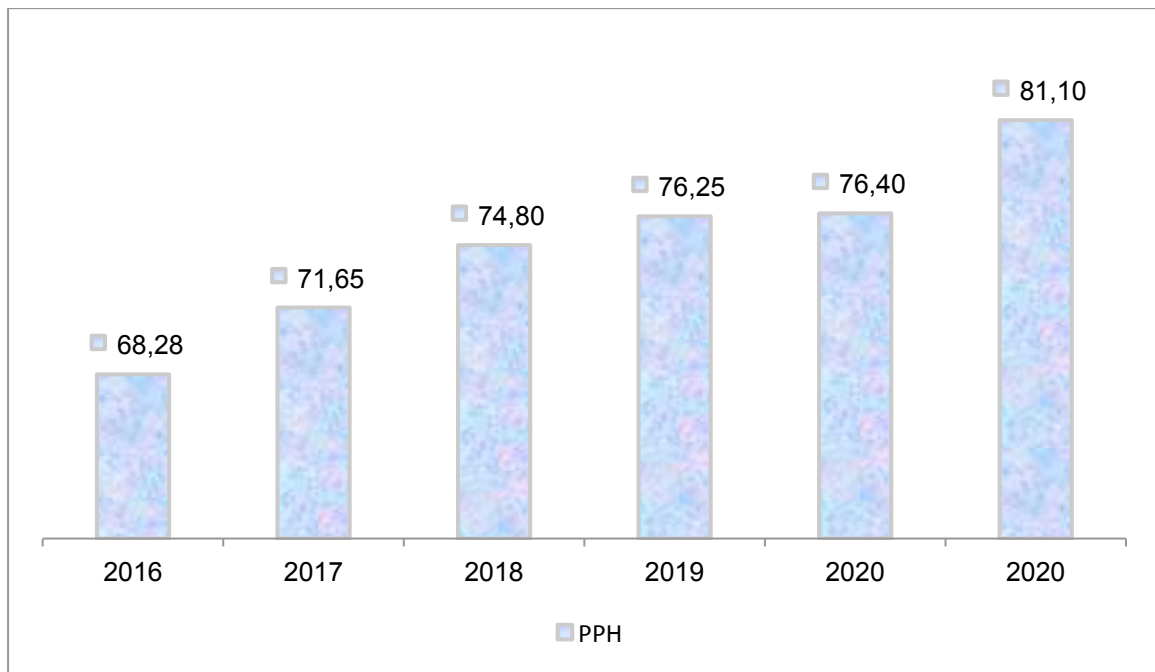


dan keseimbangan nutrisi. Empat puluh jenis nutrisi - yang terdistribusi pada 9 kelompok pangan - dibutuhkan manusia untuk hidup sehat, aktif dan produktif seyogyanya hadir disetiap menu yang dikonsumsi. Penjaminan aspek keamanan dan pemenuhan aspek sosial budaya menjadi kewajiban pemerintah.

Penjaminan kecukupan pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang diukur dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Dengan skor 100 tertinggi, semakin tinggi Skor PPH makin baik tingkat kualitas konsumsi pangan masyarakat di daerah tersebut. Skor PPH yang diperoleh dengan mengukur proporsi asupan kalori untuk setiap kelompok pangan yang diperoleh melalui Survei Konsumsi Pangan langsung Rumah Tangga (Sumber BPS).

Perhitungan PPH menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada modul konsumsi/ pengeluaran rumah tangga yang menggambarkan seluruh konsumsi/ pengeluaran dan pendapatan rumah tangga, baik konsumsi makanan maupun bukan makanan hasil Susenas. Tahun 2009-2015 modul pengeluaran susenas dengan justifikasi susenas berdasarkan pengeluaran makanan riil per kapita sebulan yang dikoreksi dengan Indeks Harga Konsumen.

Dengan pendekatan analisis data aktual konsumsi/ pengeluaran tanpa justifikasi dan menggunakan standar AKG yang sama yaitu 2.100 kilokalori/kapita/hari, maka perkembangan data Skor PPH tahun 2016 – 2021 menunjukkan tren meningkat sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 2.3 Perkembangan Skor PPH 2016 – 2020 berdasarkan konsumsi langsung Rumah Tangga (data aktual) dan Penggunaan Standar AKG 2.100 kilokalori/kapita/hari

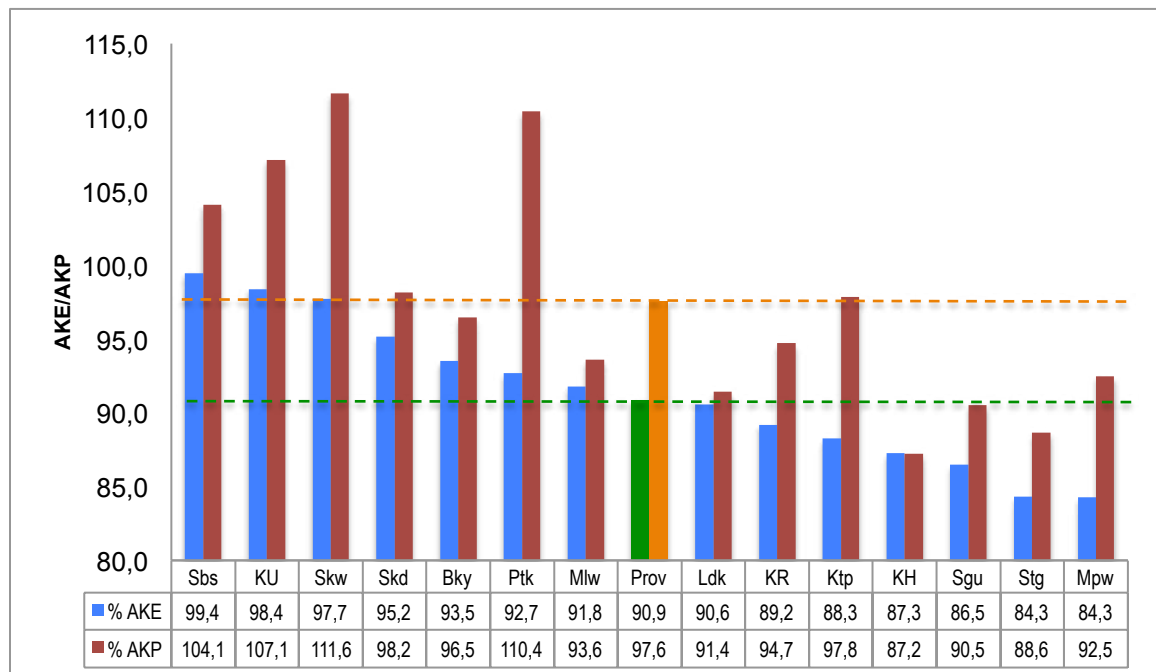


PPH yang bersumber dari tingkat konsumsi energy untuk setiap kelompok pangan, pada tahun 2018-2020 yang perbandingan dan perkembangan datanya ditunjukkan pada tabel 2.5

Tabel 2.5 Pola Konsumsi Pangan Masyarakat 2018-2020 berdasarkan Kelompok Pangan

No	Kelompok Pangan	Skor Maks	Konsumsi Energi (kkal/ kap/ hr)			Konsumsi Protein (gr. Protein/ kap/ hr)			PPH		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Padi-padian	25,00	1.181	1.176	1.160	27,27	27,15	26,82	25,00	25,00	25,00
2	Umbi-umbian	2,50	35	32	35	0,30	0,28	0,30	0,83	0,77	0,83
3	Pangan Hewani	24,00	230	228	228	20,24	20,40	20,32	21,90	21,76	21,76
4	Minyak dan Lemak	5,00	218	213	222	0,04	0,03	0,03	5,00	5,00	5,00
5	Buah/ biji berminyak	1,00	10	9	8	0,13	0,11	0,11	0,25	0,21	0,20
6	Kacang-kacangan	10,00	29	30	30	2,86	2,91	2,92	2,74	2,81	2,82
7	Gula	2,50	102	97	98	0,03	0,03	0,05	2,43	2,31	2,33
8	Sayur dan Buah	30,00	70	77	78	3,11	3,27	3,32	16,66	18,39	18,49
9	Lain-lain	-	51	50	48	1,83	1,80	1,75	-	-	-
	Total	100,00	1.926	1.913	1.908	55,80	56,00	55,62	74,81	76,25	76,40
	% AKG		91,71	91,10	90,85	97,89	98,24	97,58			

Pada tahun 2020, tingkat konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan ratio konsumsi riil terhadap konsumsi ideal per kabupaten/kota menunjukkan tertinggi di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sintang (Gambar 2.4)



Gambar 2.4 Tingkat Konsumsi Energi dan Protein Per Kabupaten/ Kota Tahun 2020

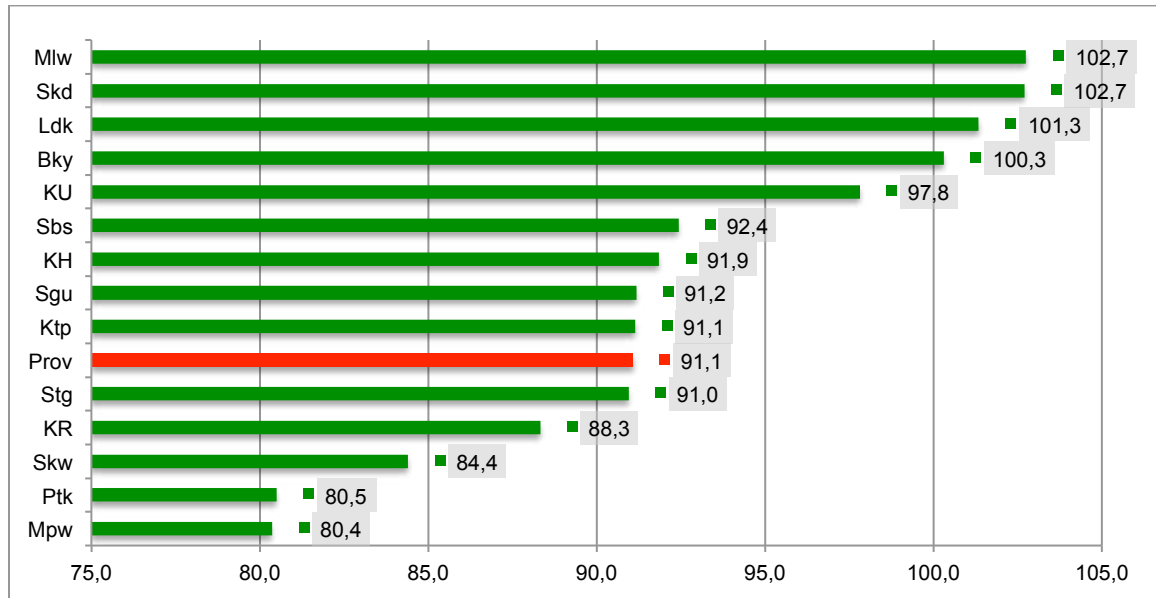


Gambaran konsumsi riil Pola Konsumsi Pangan per kabupaten/kota ditunjukkan pada tabel 2.6.

Tabel 2.6 Gambaran Pola Konsumsi Pangan masyarakat per Kabupaten/Kota Tahun 2020

No	Kab/Kota	Konsumsi Energi		Konsumsi Protein		Skor PPH	Konsumsi Beras (kg/Kap/th)
		(Kkal/Kap/hr)	% AKE	(gr. Prot/Kap/hr)	% AKP		
	PROVINSI	1.908	90,85	55,6	97,58	76,40	92,2
1	SAMBAS	2.088	99,44	59,3	104,10	76,93	96,4
2	BENGKAYANG	1.964	93,51	55,0	96,46	77,32	102,4
3	LANDAK	1.902	90,58	52,1	91,42	71,20	103,8
4	MEMPAWAH	1.770	84,27	52,7	92,47	74,28	80,0
5	SANGGAU	1.817	86,51	51,6	90,51	76,43	90,7
6	KETAPANG	1.853	88,26	55,8	97,83	73,93	91,7
7	SINTANG	1.770	84,30	50,5	88,64	74,36	89,8
8	KAPUAS HULU	1.833	87,26	49,7	87,24	65,64	93,7
9	SEKADAU	1.999	95,17	55,9	98,15	74,72	105,8
10	MELAWI	1.927	91,78	53,4	93,60	76,58	104,9
11	KAYONG UTARA	2.066	98,37	61,1	107,13	84,67	100,2
12	KUBU RAYA	1.873	89,19	54,0	94,71	73,27	89,0
13	KOTA PONTIANAK	1.946	92,66	62,9	110,40	79,16	80,7
14	KOTA SINGKAWANG	2.052	97,69	63,6	111,62	83,88	85,7

Dari tabel 2.5, konsumsi padi-padian menjadi proporsi utama kelompok pangan sebesar 25 persen, dan hampir sepenuhnya disumbang dari konsumsi beras. Tingkat Konsumsi beras merupakan alat ukur keragaman konsumsi pangan. Semakin tinggi konsumsi beras, menunjukkan semakin tinggi ketergantungan masyarakat terhadap satu jenis bahan pangan pokok. Untuk konsumsi beras, Kabupaten dengan konsumsi diatas konsumsi rata-rata beras provinsi adalah Kabupaten Sekadau, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan tujuh Kabupaten lainnya dengan tingkat konsumsi beras di bawah Provinsi.



Gambar 2.5 Konsumsi Beras Per Kabupaten/ Kota Tahun 2021

Untuk pemenuhan aspek konsumsi, ketersediaan pangan menjadi prasyarat pertama pemenuhan konsumsi pangan. Daerah tahan pangan ditunjukkan ketersediaan pangan baik bersumber dari dalam atau luar daerah (pasokan). Semakin beragam ketersediaan pangan, dukungan peningkatan konsumsi pangan yang ideal lebih dapat dipenuhi. Dari hasil penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan/pengadaan (*supply*), penggunaan/ pemanfaatan (*utilization*) pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu (dalam kurun waktu satu tahun). Dari 11 kelompok makanan, penyumbang ketersediaan energi adalah kelompok padi-padian.

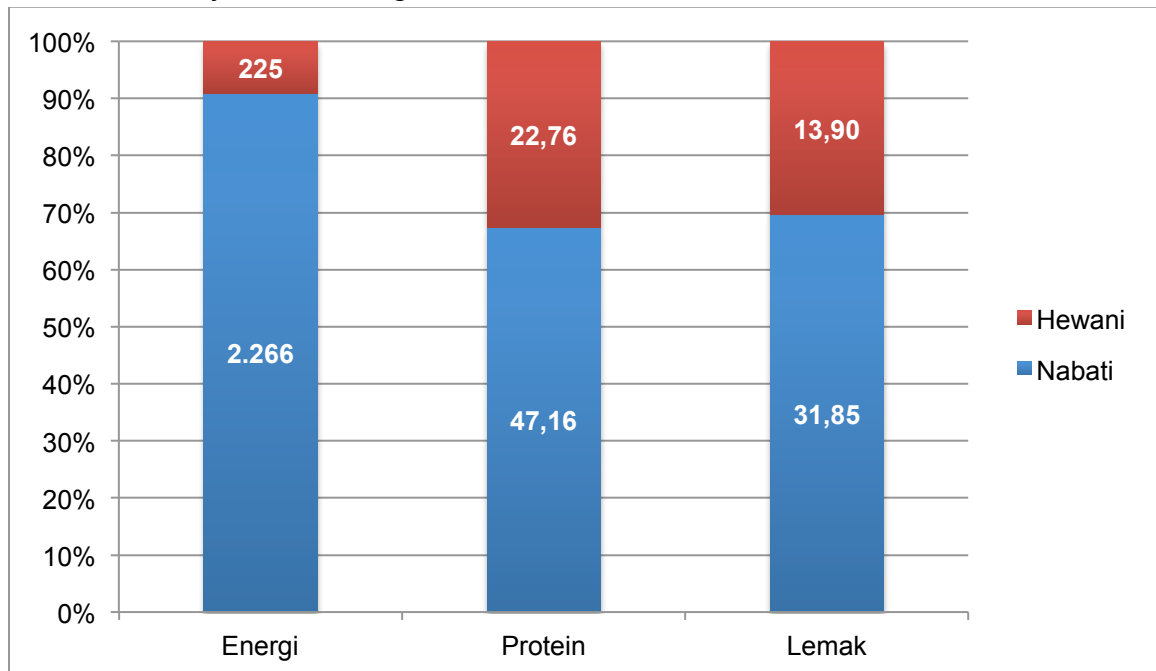
Tabel 2.7 Neraca Bahan Makanan Tahun 2020

Kelompok Bahan Pangan	Energi		Protein		Lemak	
	kKal./kap/hari	%	(Gram protein/kap/hari/Hari)	%	Gr. Lemak/kap/Hari	%
Padi-padian	1.615	67,28	38,22	60,67	10,13	22,14
Makanan berpati	149	6,19	1,00	1,60	0,34	0,75
Gula	87	3,62	0,16	0,26	0,54	1,18
Buah biji berminyak	71	2,94	4,49	7,12	4,64	10,14
Buah-buahan	55	2,29	0,73	1,15	0,29	0,64
Sayur-sayuran	39	1,62	2,51	3,98	0,47	1,02
Daging	91	3,81	5,50	8,74	7,54	16,47
Telur	57	2,38	4,56	7,24	4,03	8,82
Susu	4	0,18	0,23	0,36	0,25	0,54
Ikan	65	2,69	12,47	19,79	1,20	2,62



Kelompok Bahan Pangan	Energi		Protein		Lemak	
	kKal./kap/hari	%	(Gram protein/kap/hari/Hari)	%	Gr. Lemak/ kap/Hari	%
Minyak dan Lemak	260	10,83	0,05	0,08	16,33	35,70
Total	2.492	103,83	69,92	110,99	45,76	100,00
Nabati	2.266	94,43	47,16	74,86	31,85	69,61
Hewani	225	9,39	22,76	36,13	13,90	30,39

Dari tabel 2.7 menunjukkan bahwa ketersediaan kalori dan protein di Kalimantan Barat disumbang tertinggi oleh ketersediaan nabati dengan share berturut-turut 94,43 persen dan 74,86 persen. Tingginya kontribusi nabati menyumbang ketersediaan protein, yang menunjukkan bahwa di Kalimantan Barat belum optimal menyediakan protein hewani. Dari ketiga kelompok ketersediaan, baik energi, protein dan lemak, lebih dari 50 persen ketersediaannya disumbang dari nabati.



Gambar 2.6 Proporsi Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak Nabati dan Hewani Tahun 2020

Untuk menggambarkan tingkat keragaman ketersediaan pangan di Kalbar dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan, dengan target keragaman ideal 100,00, maka tingkat ketersediaan pangan di Kalbar pada tahun 2020 sebesar 75,14. Dua kelompok dengan skor yang masih dari skor keragaman yang dianjurkan yaitu : 1) Kelompok pangan hewani kekurangan sebesar 8,79 point; dan 2) kelompok sayuran dan buah kekurangan sebesar 10,08 point.



Tabel 2.8 Keragaman Ketersediaan Pangan Per Kelompok Pangan Tahun 2020

Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks
Padi-padian	1677	69,9	0,5	34,95	25,00	25,0
Umbi-umbian	119	5,0	0,5	2,48	2,48	2,5
Pangan Hewani	182	7,6	2,0	15,21	15,21	24,0
Minyak dan Lemak	948	39,5	0,5	19,75	5,00	5,0
Buah/biji berminyak	36	1,5	0,5	0,75	0,75	1,0
Kacang-kacangan	51	2,1	2,0	4,28	4,28	10,0
Gula	129	5,4	0,5	2,69	2,50	2,50
Sayuran dan buah	96	4,0	5,0	19,92	19,92	30,0
Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Jumlah	3238	135		100,03	75,14	100,0

Selain ketersediaan energi dan protein, situasi ketersediaan pangan pokok Kalimantan Barat Tahun 2020 dipantau dari ketersediaan berdasarkan angka kebutuhan (indeks konsumsi/kapita/tahun) menurut jenisnya. Besaran dari Indeks konsumsi/kebutuhan berpedoman pada panduan teknis penyusunan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis yang ditetapkan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI Tahun 2020. Data dan informasi ketersediaan - kebutuhan berasal meliputi data produksi dan pasokan dan dari berbagai sumber, seperti: Badan Pusat Statistik, Dinas Teknis terkait jenis produksi dan penyusunannya dilakukan secara berkala yang diperoleh melalui koordinasi Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya data ketersediaan yang tersaji dapat menjadi rujukan dalam menentukan sasaran produksi, penyediaan pasokan dan perumusan langkah-langkah dalam pemenuhan pangan sepanjang tahun. Ketersediaan – Kebutuhan bahan pangan di Kalimantan Barat tahun 2020, tampak pada tabel berikut.

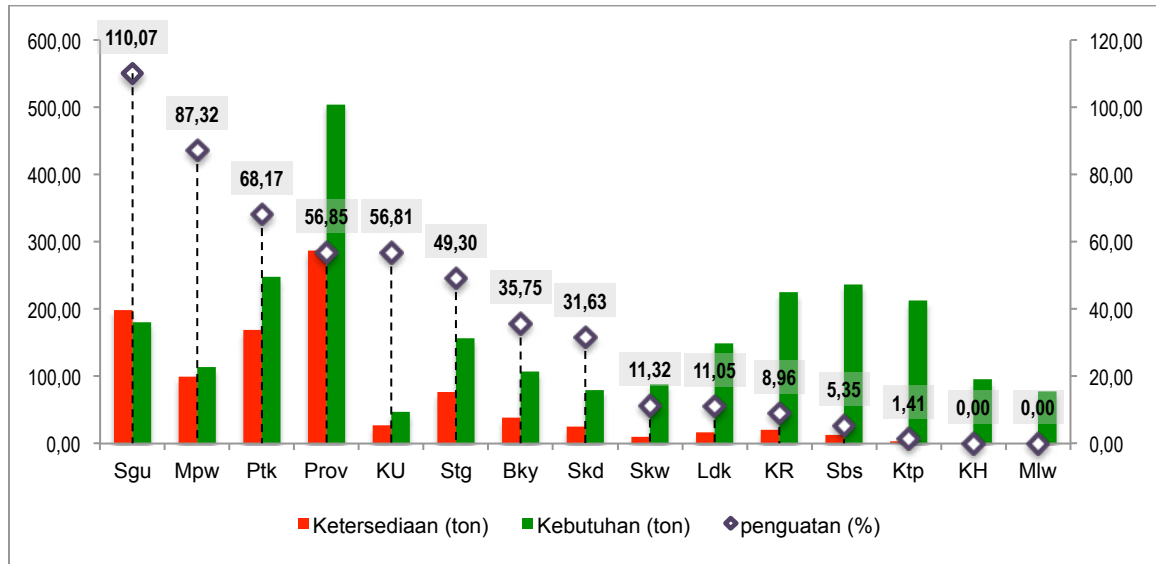
Secara umum jumlah ketersediaan bahan pangan, di Kalimantan Barat selama tahun 2020, berdasarkan perhitungan kebutuhan bahan pangan (indeks konsumsi) yang ditetapkan Badan Ketahanan Pangan (dasar acuan perhitungan kebutuhan) dalam kondisi yang cenderung negatif (minus).



Tabel 2.9 Ketersediaan-Kebutuhan bahan pangan tahun 2021

Bulan	Ketersediaan				Total	Kebutuhan (Ton)	Neraca (Ton)
	Neraca B-1	Produksi (Ton)	Perdagangan Antar Wilayah				
			Pemasukan dari Wilayah Lain	Pengiriman Ke Wilayah Lain			
Beras	160.726	457.208	230.029	-	847.963	555.057	292.905,97
Jagung	-	200.511	13.332	-	213.844	380.873	(167.029,47)
Kedelai	-	-	4.640	-	4.640	35.901	(31.260,97)
Bawang Merah	-	144	3.347	-	3.491	9.720	(6.229,07)
Bawang Putih	-	-	1.384	-	1.384	8.740	(7.356,08)
Cabai Besar	-	1.814	342	-	2.155	4.798	(2.642,85)
Cabai Rawit	-	5.035	216	-	5.252	11.502	(6.250,83)
Daging Sapi/Kerbau	-	5.650	3.232	-	8.882	13.367	(4.484,96)
Daging Ayam Ras	-	59.746	10.210	-	69.956	62.838	7.117,88
Telur Ayam Ras	-	57.800	1.984	-	59.784	63.800	(4.015,70)
Gula Pasir	-	-	39.542	-	39.542	72.113	(32.570,99)
Minyak Goreng	3.824	169.402	11.776	127.638	57.364	44.629	12.734,41

Kemampuan daerah menyediakan Cadangan pangan menjadi bagian penting mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dalam rangka menopang kebutuhan pangan pada kondisi rawan atau rentan pangan akibat bencana alam ataupun bencana sosial. Pada tahun 2021, enam daerah dengan penguatan cadangan pangan daerah diatas 40,00 persen yaitu Kabupaten Sanggau, Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, Provinsi, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Sintang. Tujuh daerah dengan penguatan cadangan pangan daerah kurang dari 40,00 persen yaitu Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Landak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sambas dan Ketapang. Dua kabupaten tidak memiliki cadangan pangan daerah yaitu Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Melawi (Gambar 2.7).



Gambar 2.7 Kebutuhan, Ketersediaan dan Penguatan CP Kabupaten/ Kota Tahun 2021

Permasalahan yang juga berpengaruh pada permasalahan atas kualitas konsumsi pangan adalah harga pangan. Strategi menyusun panel harga dilakukan dalam rangka memantau pergerakan harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen. Indikator yang paling menggambarkan harga pangan yang dapat mengganggu akses terhadap pangan dan stabilitas sosial ekonomi yaitu pemantauan terhadap harga pangan pokok beras medium (dikonsumsi paling banyak oleh masyarakat). Dari hasil panel harga pangan di empat belas kabupaten/kota, menunjukkan bahwa harga pangan relatif stabil dalam satu wilayah tetapi cenderung beragam antar kabupaten / kota. Antar waktu harga relatif stabil, tapi harga antar kabupaten sangat beragam dengan tingkat keragaman 0,99 (tabel 3.7). Dari hasil pengamatan enumerator harga pangan di 14 kabupaten/kota setiap hari sepanjang tahun, maka harga beras medium antar waktu menunjukkan tingkat keragaman 0,99 (stabil) dengan capaian realisasi 180,20 persen (sangat baik) dan berkontribusi 15,43 persen terhadap capaian sasaran kinerja 1.



Tabel 2.10 Harga Rata-rata Beras Medium Tahun 2020 di tingkat konsumen

No	KAB/KOTA	Bulan												HARGA			CV	
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	RATA2	MAX	MIN		
1	SAMBAS	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0,00
2	BENGKAYANG	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	11.743	11.636	11.511	11.536	11.614	11.837	12.000	11.511	1,77
3	LANDAK	12.406	12.400	12.404	12.400	12.400	12.440	12.400	12.400	12.400	12.401	12.404	12.500	12.413	12.500	12.400	0,24	
4	SANGGAU	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	12.783	13.000	13.000	13.000	12.986	13.607	12.625	13.000	13.607	12.625	1,73	
5	KETAPANG	12.000	12.000	12.001	11.257	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.272	12.001	11.000	3,95	
6	SINTANG	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.625	12.602	12.625	12.600	0,06	
7	K.HULU	13.000	13.000	13.000	13.000	13.061	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.071	13.011	13.071	13.000	0,20	
8	SEKADAU	13.071	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.006	13.071	13.000	0,16	
9	MELAWI	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0,00	
10	K.UTARA	11.000	11.089	11.411	11.157	11.500	11.508	11.361	11.054	11.018	11.000	10.982	10.982	11.172	11.508	10.982	1,89	
11	KUBU RAYA	11.500	11.500	11.500	11.814	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	11.860	12.000	11.500	1,88	
12	MEMPAWAH	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0,00	
13	PONTIANAK	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.279	11.300	11.298	11.300	11.279	0,05	
14	SINGKAWANG	13.000	13.000	13.000	13.000	12.950	13.000	13.036	13.026	13.000	13.000	13.000	13.000	13.001	13.036	12.950	0,15	
HARGA RATA-RATA		12.384	12.385	12.408	12.359	12.379	12.367	12.371	12.330	12.318	12.307	12.351	12.301	12.355	12.408	12.301	0,28	
HARGA MAX		13.071	13.000	13.000	13.000	13.061	13.000	13.036	13.026	13.000	13.000	13.607	13.071					
HARGA MIN		11.000	11.089	11.300	11.157	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	10.982	10.982					
CV ANTAR DAERAH		5,75	5,61	5,26	5,83	5,72	5,61	5,85	6,26	6,34	6,43	6,89	6,31					



Harga beras medium di tingkat konsumsi stabil diseluruh wilayah dengan rata-rata di tingkat provinsi sebesar 0,28. Ketimpangan harga antar daerah tertinggi di bulan November dengan sebesar 6,89 dan terendah di bulan Maret sebesar 5,26. Situasi tersebut menggambarkan distribusi beras medium di bulan Maret cukup memadai antar daerah, sehingga tidak menunjukkan ketimpangan harga yang besar.

Hasil pemantauan harga pangan strategis di 14 kabupaten/kota selama bulan Januari sampai dengan Desember 2021 menunjukkan harga yang relatif stabil di seluruh kabupaten/kota dan provinsi (Keragaman Harga/ CV kurang dari standar stabilitas harga) adalah beras medium, Bawang Goreng, Telur Ayam, Daging Ayam, Daging Sapi dan Gula Pasir, sedangkan Cabe rawit tidak stabil di seluruh kabupaten/kota, dan untuk minyak goreng kabupaten dengan pergerakan harga yang tinggi yaitu di Kabupaten Mempawah.

Tabel 2.11 Keragaman Harga Pangan Pokok/Pangan Lainnya tingkat konsumen Tahun 2021

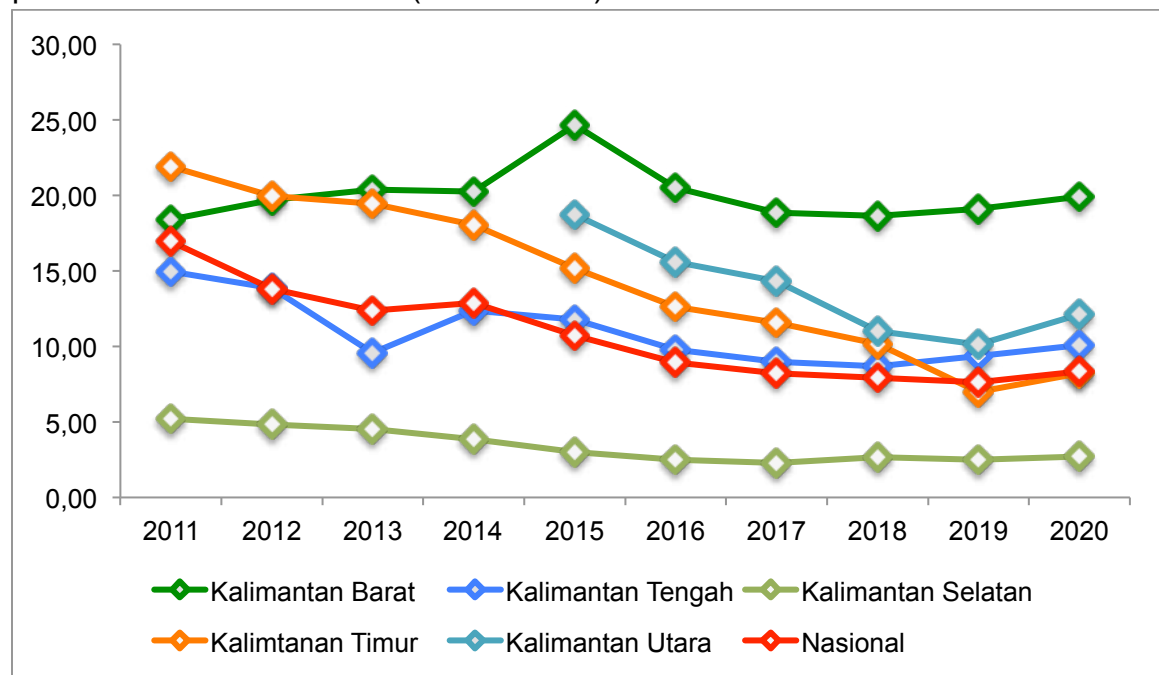
Kab/Kota	Beras Medium	Bawan Merah	Cabe Rawit	Telur Ayam	Daging Ayam	Daging Sapi	Gula Pasir	Minyak Goreng
SAMBAS	0,00	10,68	41,84	9,53	5,32	3,66	1,49	10,77
BENGKAYANG	1,77	10,34	39,92	8,15	4,55	2,40	1,34	10,45
LANDAK	0,24	10,13	41,44	7,23	9,59	2,92	1,10	12,06
SANGGAU	1,73	14,01	46,42	7,06	7,47	2,47	2,02	13,26
KETAPANG	3,95	12,23	43,10	7,34	7,74	0,79	3,39	11,83
SINTANG	0,06	8,85	41,72	6,48	5,20	2,36	0,76	15,23
K.HULU	0,20	10,47	41,74	8,67	1,08	1,70	1,84	9,64
SEKADAU	0,16	10,49	38,80	8,37	5,62	2,43	0,71	11,70
MELAWI	0,00	11,51	33,71	8,86	4,61	2,92	2,85	16,63
K.UTARA	1,89	10,50	27,72	7,19	6,13	1,34	1,70	10,85
KUBU RAYA	1,88	12,24	45,68	6,25	7,41	4,99	3,46	14,71
MEMPAWAH	0,00	12,63	40,97	8,88	8,12	3,07	0,00	17,12
PONTIANAK	0,05	9,59	49,90	6,12	9,18	0,68	1,97	12,31
SINGKAWANG	0,15	14,09	43,99	10,08	8,55	5,57	0,11	15,62
KALBAR	0,28	9,75	39,91	7,10	5,04	0,70	0,63	12,43
Stabilitas Harga (nilai CV)	≤ 5	≤ 25	≤ 25	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15

Ujung dari upaya pemantauan ketersediaan, edukasi promosi dan stabilisasi pasokan dan harga adaah menurunnya prevalensi penduduk rawan pangan, yaitu diukur dengan pendekatan PoU (Prevalence of Undernourishment). Data yang digunakan dalam perhitungan PoU adalah data hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dilaksanakan oleh BPS. Dari tahun 2012-2017 telah terjadi beberapa perubahan metode Susenas, baik dari periode pengambilan sampel, jumlah sampel, maupun jumlah komoditi



yang ditanyakan. Perubahan ini tentu akan mempengaruhi hasil perhitungan ARP. Dari Susenas Konsumsi dan Pengeluaran ini selanjutnya dapat diperoleh data konsumsi kalori penduduk. Susenas merupakan survei dengan unit analisa rumah tangga, oleh karena itu untuk memperoleh data konsumsi kalori penduduk Indonesia didekati dengan mencatat seluruh konsumsi dari setiap rumah tangga sampel. Indikator rata-rata konsumsi kalori yang dihasilkan Susenas dihitung dari total konsumsi kalori rumah tangga dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Konversi kalori menurut komoditi Susenas yang digunakan untuk perhitungan kalori berdasarkan pada hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi.

Pada rentang 2011 sampai 2020, PoU menunjukkan penurunan yang diikuti oleh provinsi di regional Kalimantan kecuali Kalimantan Barat. Puncak tertinggi di tahun 2015 dan turun sampai dengan tahun 2018, lalu naik landau pada tahun 2019 dan 2020 (Gambar 2.8).



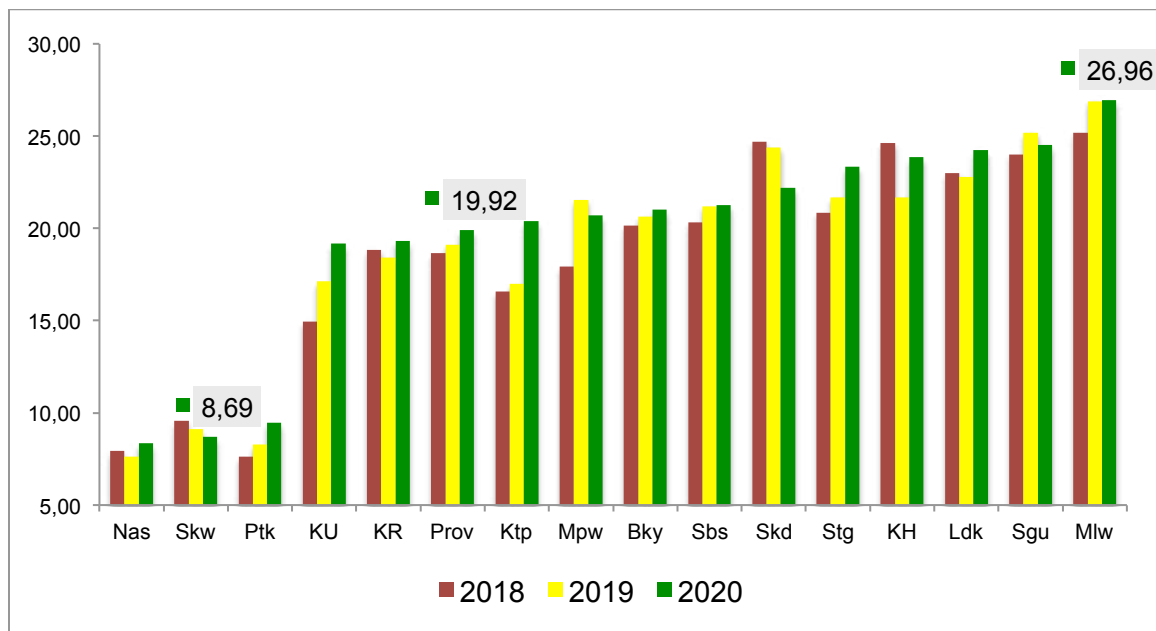
Gambar 2.8 Perkembangan PoU Provinsi Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2011-2020

PoU Kabupaten/Kota tahun 2011-2019 cenderung meningkat seiring pergerakan angka PoU Provinsi (Gambar 2.9). pada tahun 2020, PoU tertinggi adalah Kabupaten Melawi dan terendah di Kota Singkawang.

Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu adalah daerah yang PoU tahun 2020 meningkat tajam dibandingkan tahun 2019, sedangkan Kota Singkawang, Kabupaten Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sanggau adalah empat wilayah dengan PoU 2020 lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Tujuh kabupaten lainnya, PoU 2020 mengalami peningkatan yang tidak signifikan dibandingkan tahun 2019.

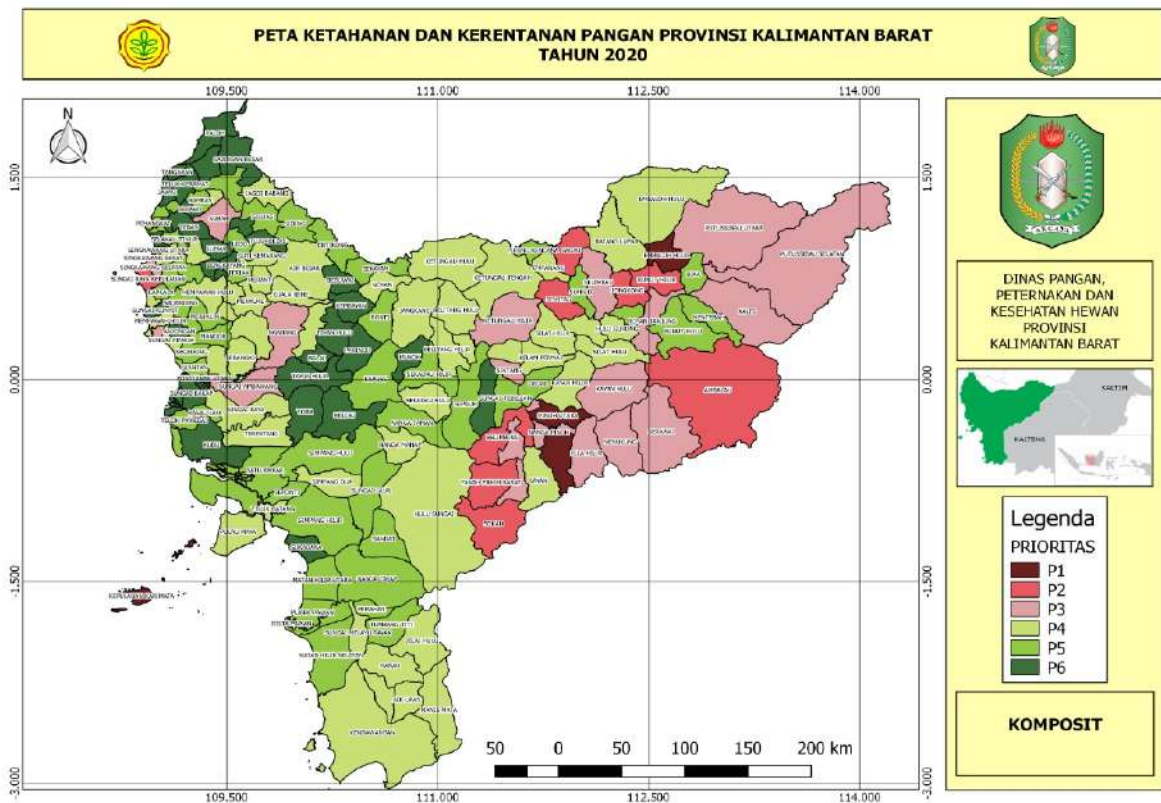


sepuluh kabupaten lain, PoU 2019 lebih tinggi dibandingkan tahun dua tahun sebelumnya.



Gambar 2.9 Perkembangan PoU Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020

Selain dengan pendekatan PoU, pemetaan tingkat ketahanan dan kerentanan pangan diukur dengan pendekatan wilayah melalui Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan level Kecamatan dengan sembilan indikator, maka situasi ketahanan dan kerentanan pangan Kalimantan Barat Tahun 2020 dari berdasarkan indek komposit, jumlah kecamatan tahun 2020 yang berstatus **rentan pangan** (prioritas 1 – 3) menurun menjadi 33 kecamatan atau kecenderungan membaik (Data KSA BPS 2019) dibandingkan 77 kecamatan tahun 2019 (Data Update KSA BPS 2019), sementara jumlah kecamatan yang berstatus **tahan pangan** (prioritas 4 – 6) meningkat menjadi 141 kecamatan atau kecenderungan membaik (Data KSA BPS 2019) dibandingkan 97 kecamatan tahun 2019 (Data Update KSA BPS 2019).



Gambar 2.10 Update Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Level Kecamatan Tahun 2020

Sebaran kecamatan dengan kategori tahan pangan (prioritas 4 s.d 6) sebanyak 131 kecamatan dan rentan pangan (prioritas 1 s.d 3) sebanyak 33 kecamatan (tabel 2.12)

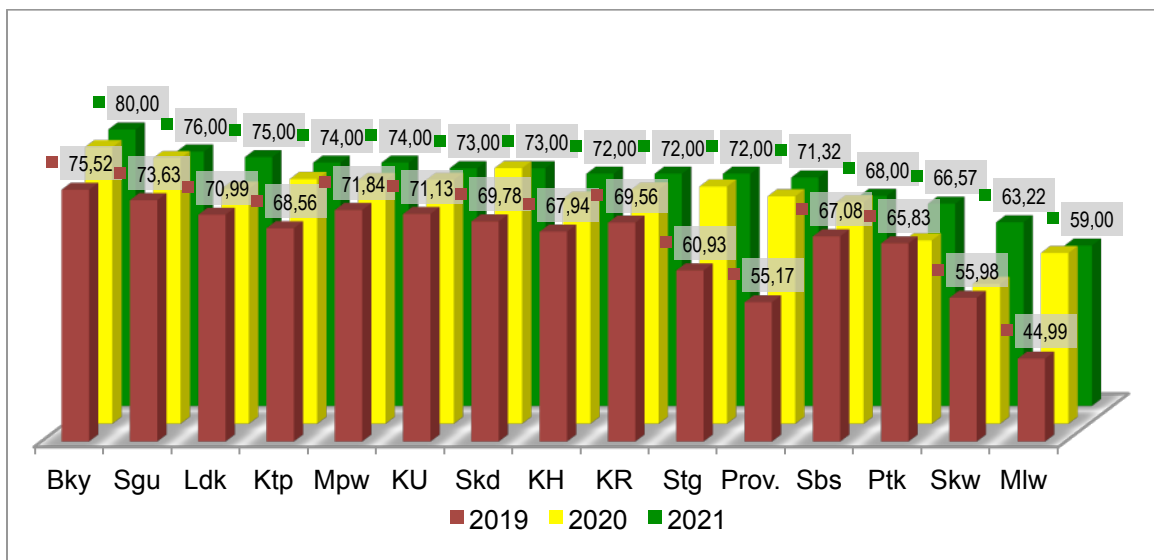
Tabel 2.12 Sebaran Kecamatan pada per kategori Tahan dan Rentan Pangan tahun 2020

Kab/Kota	Rentan Pangan (Kec.)			Tahan Pangan (Kec.)		
	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 4	Prioritas 5	Prioritas 6
Sambas	0	1	0	3	12	2
Bengkayang	0	2	0	3	9	4
Landak	0	0	1	3	9	0
Sanggau	0	0	1	3	9	2
Ketapang	0	0	2	6	12	0
Sintang	0	0	5	6	3	0
Kapuas Hulu	1	2	8	6	6	0
Sekadau	0	0	0	1	6	0
Melawi	0	3	4	4	0	0
Kayong Utara	0	1	0	2	1	2
Kubu Raya	0	0	1	0	5	3
Mempawah	0	1	0	1	4	3



Kab/Kota	Rentan Pangan (Kec.)			Tahan Pangan (Kec.)		
	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 4	Prioritas 5	Prioritas 6
Pontianak	0	0	0	1	1	4
Singkawang	0	0	0	2	2	1
	1	10	22	41	79	21

Dasar indikator: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu (bulanan/tahunan), mencakup seluruh kabupaten/kotadan provinsi, maka Indeks Ketahanan Pangan rata-rata Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat adalah 71,32 dengan dua kabupaten tahan pangan yaitu Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Bengkayang, satu kabupaten agak tahan pangan prioritas Kabupaten Melawi, dan sebelas kabupaten lainnya dengan status Tahan Pangan (Gambar 2.11)



Gambar 2.11 IKP kabupaten/Kota tahun 2019-2020

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan urusan wajib bidang pangan dan Urusan Pilihan Bidang Pertanian sub sektor peternakan dan kesehatan hewan. Oleh karena itu, kemampuan untuk merumuskan secara detail dan cermat untuk melihat aspek pelayanan di tingkat individu dalam Pelayanan urusan wajib bidang pangan, dan kemampuan menelaah peluang pengembangan usaha peternakan berbasis potensi daerah dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip agribisnis sehingga mampu meningkatkan nilai keekonomian daerah dan petani.



Tantangan dan Peluang merupakan kondisi eksternal diluar kendali dan kewenangan PD yang harus diidentifikasi dan diinventarisir dalam upaya untuk merumuskan strategi yang dapat dibangun untuk mengembangkan pelayanan dan kinerja perangkat daerah.

Ketahanan Pangan merupakan isu strategis yang berkaitan dengan aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ketahanan sosial, stabilitas ekonomi dan politik, ketahanan nasional dan kemandirian bangsa berhubungan secara strategis dengan ketahanan pangan nasional dan masyarakat. Secara Filosofis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menguraikan bahwa ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan dapat dipandang dalam berbagai tingkatan. Pada tingkat Global, ketahanan pangan ditentukan oleh ketersediaan pangan dunia. Di tingkat Nasional, ketahanan pangan nasional dipengaruhi dari jumlah produksi dalam negeri dan impor. Untuk ketahanan pangan individu dan rumah tangga ditentukan oleh kemampuan rumah tangga untuk mengakses pangan yang dipengaruhi ketersediaan pangan dan pendapatan rumah tangga yang selanjutnya akan mempengaruhi akses hidup sehat dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Ketersediaan pangan yang cukup, perlu diikuti oleh upaya untuk meningkatkan akses pangan masyarakat untuk mencapai ketahanan pangan keluarga. Pembangunan ketahanan pangan keluarga dilakukan untuk mencegah munculnya kerawanan pangan yang dapat memicu kerawanan sosial dan politik.

Dalam konteks pembangunan nasional dan daerah, kebijakan pembangunan ketahanan pangan mengarah kepada kemandirian pangan (*food reliance*) dan kedaulatan pangan (*food severegnity*). Kemandirian pangan sebagai bentuk kemampuan negara dan bangsa untuk memproduksi pangan yang beranekaragam dari dalam negeri yang dapat menjamin kebutuhan pangan hingga ke tingkat perorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal (SDA, SDM, Sosial, Ekonomi dan kearifan lokal) secara bermartabat. Sedangkan kedaulatan pangan menunjukkan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemandirian dan kedaulatan pangan dicirikan oleh tiga hal pokok: (a) ketersediaan pangan berbasis sumber daya lokal; (b) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi seluruh masyarakat; dan (c) pemanfaatan pangan.

Dalam konteks tersebut, secara nyata bahwa ketahanan pangan harus bertumpu pada sumber daya lokal, yaitu sumber-sumber bahan pangan, kelembagaan pangan dan budaya lokal yang dimiliki masyarakat dalam suatu wilayah. Dengan mengedepankan sumber daya lokal, maka ketahanan pangan



masyarakat akan kokoh dan tidak mudah terpengaruh oleh masalah yang terjadi di luar wilayahnya ataupun kondisi global. Pemenuhan dan penguatan produksi domestik yang mendukung budaya pangan lokal memerlukan dukungan kebijakan dan politik.

Kebijakan pemenuhan pangan pokok masyarakat yang selama ini bertumpu kepada beras menyebabkan masyarakat meninggalkan pola konsumsi pangan lokal dan beralih ke satu jenis bahan pangan pokok beras. Konsumsi beras per kapita penduduk Indonesia tahun 2017 sebesar 117 kg per kapita per tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Korea Selatan sebesar 40 kg, Jepang hanya 50 kg, Malaysia 80 kg dan Thailand sebesar 70 kg per kapita per tahun. Ketergantungan konsumsi beras yang tinggi menyebabkan pemerintah harus berupaya keras menyediakan beras secara masif, sedangkan ketersediaan lahan produksi padi semakin menurun. Impor beras menjadi kebijakan pemerintah yang kurang produktif mengakibatkan terganggunya ketahanan pangan nasional dan ketahanan nasional. Semakin tinggi ketergantungan akan beras impor menjadikan negara dan daerah pengimpor semakin tidak berdaulat. Oleh karena itu, reorientasi kebijakan produksi pangan tidak hanya fokus kepada produksi padi, tetapi kearah pendayagunaan seluruh potensi lahan dengan komoditas pangan yang lebih beragam dan disertai dengan percepatan reorientasi budaya konsumsi pangan lokal hingga di tingkat rumah tangga.

Dari capaian kinerja pangan daerah, pandangan dan perkembangan pangan secara nasional, maka tantangan dalam pelayanan PD di bidang Pangan antara lain:

1. Kejadian Bencana Alam dan Kegagalan Panen masih sering terjadi hampir disemua wilayah di Kalimantan Barat. Kejadian bencana berupa banjir dan puting beliung menjadi kejadian yang dapat diperkirakan terjadi setiap tahunnya. Kegagalan panen dapat pula disebabkan oleh iklim yang tidak menentu dan sulit diperhitungkan. Hujan dan kemarau sulit diperkirakan waktu dan panjang atau rentang kejadiannya.
2. Penduduk di daerah tertinggal, terbelakang dan terpencil masih banyak dijumpai di Kalimantan Barat. Keterbatasan pembiayaan daerah untuk membangun jalan untuk membuka keterisolasian komunitas / kelompok masyarakat tertentu menjadi penyebab tingginya potensi penduduk rawan pangan berkenaan dengan ketersediaan dan akses yang rendah. Bahkan keterisolasian dapat menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan berdampak negatif pada pemanfaatan pangan yaitu menurunnya kualitas hidup penduduk dengan meningkatkan permasalahan gizi masyarakat (*malnutrition*).
3. Kemiskinan berhubungan erat dengan kerawanan pangan. Walaupun tidak identik, akan tetapi kemiskinan sebagai salah satu penyebab menurunkan kemampuan akses ekonomi terhadap pangan. Pengentasan kemiskinan dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, akan



tetapi jika kemampuannya mengelola pangan tidak memadai, maka kerawanan pangan dan gizi (*malnutrition*) akan tetap menjadi masalah bagi pemerintah daerah.

Pada tahun 2020, Kejadian Bencana Non Pandemi Covid-19 telah berdampak nyata meningkatkan turunnya perekonomian nasional dan daerah. kondisi tersebut menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang secara langsung berdampak kepada menurunnya akses pangan masyarakat yang berkualitas.

4. Ketergantungan pada satu jenis pangan pokok yaitu beras memaksa pemerintah daerah untuk mampu menyediakan beras sebagai sumber pangan pokok bagi 2,5 juta penduduk Kalimantan Barat, sedangkan kemampuan produksi sangat terbatas yang disebabkan beberapa kendala berikut:
 - Ketersediaan lahan produksi (sawah dan ladang).
 - Infrastruktur pangan (Pergudangan/ Logistik, Irigasi dan Jalan Produksi) yang sangat terbatas.
 - Teknologi, Sarana dan Prasarana produksi pangan membutuhkan investasi biaya yang besar yang sangat terbatas jika hanya dikembangkan oleh petani.
 - Sumber Daya Manusia baik jumlah maupun kompetensi sangat kurang untuk meningkatkan produksi pangan.
 - Persaingan pemanfaatan lahan dan air untuk aktivitas pembangunan lainnya.
 - Konversi Lahan sawah yang strategis menjadi penggunaan lahan non sawah atau berubah menjadi produksi non padi.
 - Prioritas kebijakan pemerintah sampai dengan saat ini, didominasi untuk memberikan insentif yang tinggi baik untuk produksi maupun konsumsi beras.
 - Belum tersedianya Sistem Informasi Pangan yang dapat memberikan gambaran pangan dengan cepat dan terbuka.
5. Pola Konsumsi masih menunjukkan tingginya konsumsi beras penduduk. Hal tersebut disebabkan beberapa hal berikut:
 - Harga beras yang murah.
 - Beras tersedia dimana saja, bahkan di daerah terpencil dengan adanya beras Sejahtera (Rastra).
 - Beras lebih mudah disimpan sebagai cadangan pangan.
 - Beras lebih mudah diolah.
 - Proporsi Konsumsi penduduk yang masih belum beragam dan seimbang. Konsumsi nasi sebagai pangan pokok lebih banyak dari jumlah yang direkomendasi untuk dikonsumsi per hari, yakni melebihi 50 persen dari pangan yang dikonsumsi per kali nya.
 - Gizi yang terkandung pada beras, sampai dengan saat ini masih jauh lebih baik dibandingkan sumber pangan pokok lainnya.



6. Pergeseran konsumsi pangan tidak ke umbi-umbian, sagu dan atau jagung (pangan produksi lokal), tetapi bergeser dengan meningkatnya konsumsi terigu yang notabene merupakan pangan impor dan tidak dapat diproduksi oleh petani lokal. Permintaan ke terigu disebabkan beberapa hal berikut:
 - Terigu dapat diolah menjadi beragam produk pangan turunan seperti roti, penganan, mie, dan lain-lain.
 - Terigu mudah didapat dimanapun dan harga yang terjangkau.
 - Budaya konsumsi rumah tangga untuk menyediakan pangan yang mudah dan cepat (instan).
7. Pemberlakuan pasar bebas sebagai bagian dari kebijakan ekonomi Global menyebabkan semakin mudahnya pangan lokal yang tidak berdaya saing dikalahkan oleh produk-produk pangan impor baik olahan maupun pangan segar.
8. Rendahnya konsumsi kelompok pangan sayur dan buah, serta kacang-kacangan yang dipengaruhi budaya ketidakseimbangan pola konsumsi. Porsi pangan karbohidrat yang diatas separuh kelompok pangan lainnya, serta tingkat pendapatan dan pendidikan berpengaruh pada keinginan dan kemampuan akses kedua kelompok pangan tersebut.
9. Permintaan pangan non beras yang berasal dari produksi lokal seperti umbi-umbian, jagung dan sagu sangat rendah untuk kebutuhan konsumsi penduduk disebabkan beberapa hal berikut:
 - Umbi-umbian, jagung dan sagu identik dengan pangan *inferior*.
 - Lebih sulit disimpan dan rumit untuk diolah.
 - Tidak tersedia setiap saat.
 - Pola dan budaya konsumsi yang semakin tidak mengenal umbi-umbian, jagung dan sagu sebagai pangan pokok.

Dari tantangan tersebut, maka peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah antara lain:

1. Lahan di Kalimantan Barat masih tersedia sangat luas, akan tetapi tata kelola dan pemanfaatannya oleh Pemerintah masih lemah. Perlu regulasi yang mengatur pemanfaatan lahan dan air sehingga dapat mendukung produksi pangan pangan.
2. Selain pangan pokok beras, maka pemerintah harus mampu menjaga dan meningkatkan produksi umbi-umbian, jagung, sagu, dan pangan pokok lainnya dan menjaga plasma nutfah sumber pangan lokal daerah.
3. Penganekaragaman konsumsi pangan dapat diartikan sebagai penyediaan alternatif sumber pangan, dan juga sebagai bentuk penganekaragaman sumber gizi yang dimakan sebagai upaya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
4. Mengurangi konsumsi terigu akan membantu menyelamatkan devisa negara dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Beralihnya sumber tepung-tepungan dari terigu menjadi tepung berbahan pangan lokal akan meningkatkan pendapatan petani umbi-umbian atau pangan lokal lainnya



yang ditanam di lahan marjinal. Selain itu, meningkatnya pemanfaatan pangan lokal akan mendorong berkembangnya industri pangan olahan berbasis pangan lokal, sehingga dapat meningkatkan aktivitas usaha Mikro tingkat Kecil dan Menengah (UMKM).

5. Meningkatkan produksi lokal dan mengurangi ketergantungan dengan impor pangan berdampak pada kemampuan daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan. Fluktuasi harga yang tinggi akan memberatkan kemampuan masyarakat untuk menyediakan pangan keluarga.
6. Mendorong masyarakat untuk mampu menyediakan pangan keluarganya sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti pemanfaatan pekarangan untuk pangan. Menyediakan pangan seperti sayur dan buah dengan memproduksi sendiri, juga akan berdampak baik untuk menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi saat terjadi kelangkaan pangan.
7. Melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan dengan baik dan benar menjadi salah satu upaya yang dapat menurunkan kerawanan pangan dan gizi masyarakat. Ibu Rumah Tangga dan pelajar/mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang potensial untuk ditingkatkan pemahaman dan wawasannya tentang Pola Konsumsi Pangan yang dianjurkan sesuai kaidah Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).



A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

BAB 3. PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS

Pelaksanaan pelayanan melalui Program-program pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat adalah untuk mewujudkan kondisi ideal dalam tatanan pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan dalam Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan pemetaan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat (Tabel 3.1).

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga hingga ke individu memerlukan pangan yang cukup, aman, beragam dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif.	<p>Untuk pemenuhan kecukupan pangan untuk hidup sehat, aktif dan produktif oleh setiap individu dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak sepenuhnya Ketersediaan pangan dipenuhi dari hasil produksi dalam daerah; 2. Rendahnya Keterjangkauan pangan yang karena hambatan fisik wilayah, sosial dan ekonomi; 3. Pemanfaatan pangan belum memenuhi kaidah beragam, bergizi seimbang dan aman juga dipengaruhi oleh aspek sosial dan budaya masyarakat. <p>Masih kurangnya keragaman pangan baik Ketersediaan, Keterjangkauan dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan produksi pangan yang beragam dari dalam daerah; 2. Ketidakstabilan pasokan dan harga pangan; 3. Adanya kelompok masyarakat yang rawan pangan; 4. Konsumsi pangan yang belum beragam dan bergizi seimbang yang dipengaruhi budaya dan pendidikan, serta ekonomi Keluarga; 5. Tingginya ketergantungan pada satu jenis pangan pokok; 6. Potensi pangan lokal yang kurang dikembangkan; 7. Masih tingginya resiko pangan yang kurang aman dikonsumsi; 8. Daya saing pangan dalam daerah di pasar dalam dan luar



		<p>Pemanfaatan untuk pemenuhan gizi yang beragam dan berimbang.</p> <p>Keragaman Pangan Lokal belum sepenuhnya dikembangkan sebagai sumber kekayaan hayati penyediaan pangan bagi masyarakat untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan.</p>	<p>negeri karena kurangnya penjaminan keamanan Pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dan Pangan Asal Hewan (PAH);</p> <p>9. Masih adanya kejadian rawan pangan kronis dan transien;</p> <p>10. Ketersediaan pangan selain ditentukan oleh produksi dan impor/ekspor pangan, juga ditentukan oleh ketersediaan cadangan pangan.</p> <p>11. Kondisi Georafi dan Sumber Daya Buatan yang kurang mendukung ketersediaan dan akses pangan penduduk.</p>
--	--	--	--

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Masa jabatan gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 merupakan periode lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD dikemukakan bahwa visi pembangunan jangka panjang Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2025 adalah “Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”. Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 berkomitmen melaksanakan kepemimpinannya mewujudkan visi RPJPD tersebut. Oleh karena itu, Visi Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah **TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN.**

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan Misi Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat



berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance***, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).
3. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
6. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

Berdasarkan rumusan Misi Gubernur 2018-2023, yang berkaitan dengan Ketahanan Pangan adalah Misi ketiga yaitu **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif**. Perwujudan Misi ketiga tertuang dalam berupa (1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan; (2) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat; (3) Program Penanganan Kerawanan Pangan; Dan (4) Program Pengawasan Keamanan Pangan.



Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat yang mempengaruhi pencapaian misi-misi Gubernur yang diampu OPD melalui Program Strategis Daerah/ Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Misi	Program Strategis	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih tersedianya Lahan yang dapat dikelola untuk mendukung produksi pangan; - Memiliki perbatasan antar negara - Berbatasan darat dengan satu provinsi; - Akses pangan ke daerah sumber pangan di provinsi lain melalui transportasi laut; - Panjang sungai mendukung angkutan pangan melalui transportasi sungai; - Tersedianya dukungan logistik pemerintah pusat di 7 kabupaten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi Pangan daerah yang belum beragam dan belum optimal; - Beberapa komoditas pangan yang strategis masih tergantung dengan produksi dari luar daerah; - Kecepatan pertumbuhan produksi pangan lebih lambat dari pertumbuhan penduduk; - Keterbatasan lahan produksi pangan yang berbasis kawasan; - Alih fungsi lahan dan persaingan penggunaan lahan dengan sektor non pangan dan pemukiman; - Kondisi Infrastruktur dan sarana prasarana pangan yang belum baik; - Kualitas dan kapasitas SDM yang masih



Misi	Program Strategis	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			<p>rendah;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan kemampuan pembiayaan daerah. - Terbatasnya data dan informasi mendukung pemetaan sumber dan logistik pangan. - Melemahnya budaya lumbung pangan masyarakat.
	<p>Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi beras yang surplus; - Keanekaragaman Hayati dan Plasma Nutfah lokal; - Tersedianya lokasi produksi pangan yang menyebar di beberapa wilayah (pesisir, tengah dan pedalaman) - Luasnya wilayah provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pola Konsumsi yang belum beragam dan berimbang; - Ketergantungan pada satu jenis pangan pokok, Budaya konsumsi pangan yang kurang beragam; - Pendidikan Ibu Rumah Tanggal yang masih rendah; - Tingginya pemanfaatan produk impor (terigu) sebagai pangan olahan; - Inflasi sektor pangan yang masih belum terkendali; - Belum berkembang teknologi pemanfaatan dan



Misi	Program Strategis	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			<p>pengolahan pangan lokal sebagai sumber pangan pokok dan cadangan pangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - - Tingkat pendidikan rendah - kurangnya pengetahuan tentang konsumsi yang beragam dan berimbang - Kompetensi dan Kapasitas SDM Pangan yang memadai.
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan produksi pangan dan pendapatan penduduk yang menjamin akses terhadap pangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penduduk kurang sejahtera dan rawan pangan yang tinggi - Masih terdapat daerah-daerah yang tertinggal, terpencil dan terisolasi; - Luas Provinsi dan kondisi topografi wilayah yang berat; - Kejadian bencana alam yang masih terjadi; - Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
	Program Pengawasan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan dan pendidikan mendorong 	<ul style="list-style-type: none"> - Pencemaran bahan berbahaya



Misi	Program Strategis	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Pangan	kesadaran konsumsi dan akses pangan yang aman dan berkualitas. - Regulasi keamanan pangan yang diperkuat	dikonsumsi pada produk pangan segar asal tumbuhan; - Produk pangan segar yang kurang bersaing di pasar internasional; - Belum terbentuknya kelembagaan otoritas keamanan pangan - Keluar masuk pangan segar antar provinsi dan antar negara tidak dalam jaminan pemantauan dan pengawasan keamanan pangan.

C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

1) Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Dari hasil penyempurnaan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024 Revisi kedua, merujuk pada visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong" dan Visi Menteri pertanian yaitu "Pertanian Yang Maju, mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju, Berdaulat, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong", maka misi kementerian Pertanian adalah :

1. Mewujudkan Ketahanan Pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Pengelolaan kementerian pertanian yang bersih, efektif dan Terpercaya.

Ketahanan pangan yang akan diwujudkan melalui kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah dan mutu. Selain itu menjamin



pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya hidup masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Maka tujuan Badan Ketahanan Pangan yang merupakan bagian dari Tujuan Kementerian pertanian adalah “Meningkatnya pemantapan ketahanan pangan” dan “Terwujudnya reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian”. Indikator dari kedua tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan:
 - Global Food Security Index/ GFSI
 - Skor pola Pangan Harapan
 - Angka Kecukupan energy (AKE)
 - Angka Kecukupan protein
 - Prevalence of Undernourishment/ PoU
 - Ketersediaan beras
 - Ketersediaan protein hewani
 - Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi
 - Persentasi pangan organik
2. Terwujudnya reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian
 - Nilai reformasi Birokrasi
 - Opini BPK RI

Empat Sasaran Badan Ketahanan Pangan mengemban misi tahun 2020-2024 dituangkan dalam sembilan sasaran program dengan indicator sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan ketersediaan pangan strategis dalam negeri
 - a. Stabilitas harga dan pasokan pangan
 - b. Penguatan cadangan pangan
 - c. Meningkatkan ketersediaan pangan local sumber karbohidrat non beras
 - d. Menurunnya daerah rentan pangan
- 2) Terjaminnya keamanan mutu pangan strategis :
 - a. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PSAT)
 - b. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan
- 3) Terwujudnya birokrasi kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan prima
- 4) Terkelolanya anggaran badan ketahanan Pangan yang akuntabel dan berkualitas.

Sasaran dan target kinerja tersebut secara keseluruhan menjadi rujukan untuk mendukung pembangunan ketahanan pangan daerah Provinsi Kalimantan Barat, sehingga menjadikan pembangunan ketahanan pangan



nasional dan daerah yang saling bersinergi dan menguatkan yang tertuang dalam program prioritas daerah yaitu **Program Peningkatan Ketahanan Pangan**.

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat yang mempengaruhi pencapaian target Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Daerah/ Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah/ OPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih tersedianya Lahan yang dapat dikelola untuk mendukung produksi pangan; - Memiliki perbatasan antar negara - Berbatasan darat dengan satu provinsi; - Akses pangan ke daerah sumber pangan di provinsi lain melalui transportasi laut; - Panjang sungai mendukung angkutan pangan melalui transportasi sungai; - Tersedianya dukungan logistik pemerintah pusat di 7 kabupaten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi Pangan daerah yang belum beragam dan belum optimal; - Beberapa komoditas pangan yang strategis masih tergantung dengan produksi dari luar daerah; - Kecepatan pertumbuhan produksi pangan lebih lambat dari pertumbuhan jumlah penduduk; - Keterbatasan lahan produksi pangan yang berbasis kawasan; - Alih fungsi lahan dan persaingan penggunaan lahan dengan sektor non pangan dan pemukiman; - Kondisi Infrastruktur dan sarana prasarana pangan yang belum baik;



Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah/ OPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas dan kapasitas SDM yang masih rendah; - Keterbatasan kemampuan pembiayaan daerah. - Terbatasnya data dan informasi mendukung pemetaan sumber dan logistik pangan. - Melemahnya budaya lumbung pangan masyarakat.
	<p>Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi beras yang surplus; - Keanekaragaman Hayati dan Plasma Nutfah lokal; - Tersedianya lokasi produksi pangan yang menyebar di beberapa wilayah (pesisir, tengah dan pedalaman) - Luasnya wilayah provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pola Konsumsi yang belum beragam dan berimbang; - Ketergantungan pada satu jenis pangan pokok, Budaya konsumsi pangan yang kurang beragam; - Pendidikan Ibu Rumah Tanggal yang masih rendah; - Tingginya pemanfaatan produk impor (terigu) sebagai pangan olahan; - Inflasi sektor pangan yang masih belum terkendali; - Belum berkembang



Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah/ OPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			teknologi pemanfaatan dan pengolahan pangan lokal sebagai sumber pangan pokok dan cadangan pangan; - - Tingkat pendidikan rendah - kurangnya pengetahuan tentang konsumsi yang beragam dan berimbang - Kompetensi dan Kapasitas SDM Pangan yang memadai.
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	- Pertumbuhan produksi pangan dan pendapatan penduduk yang menjamin akses terhadap pangan	- Jumlah Penduduk kurang sejahtera dan rawan pangan yang tinggi - Masih terdapat daerah-daerah yang tertinggal, terpencil dan terisolasi; - Luas Provinsi dan kondisi topografi wilayah yang berat; - Kejadian bencana alam yang masih terjadi; - Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;



Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah/ OPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan dan pendidikan mendorong kesadaran konsumsi dan akses pangan yang aman dan berkualitas. - Regulasi keamanan pangan yang diperkuat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pencemaran bahan berbahaya dikonsumsi pada produk pangan segar asal tumbuhan; - Produk pangan segar yang kurang bersaing di pasar internasional; - Belum terbentuknya kelembagaan otoritas keamanan pangan - Keluar masuk pangan segar antar provinsi dan antar negara tidak dalam jaminan pemantauan dan pengawasan keamanan pangan.

2) Renstra Dinas Ketahanan Pangan di kabupaten/kota Kabupaten/Kota

Pemetaan Dinas yang menangani Fungsi Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota ditunjukkan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Pemetaan Fungsi pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA DINAS	KABUPATEN/ KOTA	FUNGSI		
			PANGAN	PETERNAKAN	KESEHATAN HEWAN
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sambas	Kabupaten Sambas	√		
2	Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Sambas	Kabupaten Sambas		√	√
3	Dinas Pangan, Pertanian dan	Kabupaten	√	√	√



NO	NAMA DINAS	KABUPATEN/ KOTA	FUNGSI		
			PANGAN	PETERNAKAN	KESEHATAN HEWAN
	Perikanan Kab. Bengkayang	Bengkayang			
4	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Mempawah	Kabupaten Mempawah	√	√	√
5	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Landak	Kabupaten Landak	√	√	√
6	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kab. Sanggau	Kabupaten Sanggau	√		
7	Dinas Peternakan dan Perkebunan Kab. Sanggau	Kabupaten Sanggau		√	√
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Sekadau	Kabupaten Sekadau	√	√	√
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Sintang	Kabupaten Sintang	√		
10	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Sintang	Kabupaten Sintang		√	√
11	Dinas Pangan dan Perkebunan Kab. Melawi	Kabupaten Melawi	√		
12	Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Melawi	Kabupaten Melawi		√	√
13	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu	Kabupaten Kapuas Hulu	√	√	√
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Ketapang	Kabupaten Ketapang	√		
15	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Ketapang	Kabupaten Ketapang		√	√
16	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kayong Utara	Kabupaten Kayong Utara	√	√	√
17	Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya	√	√	√
18	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	Kota Pontianak	√	√	√
19	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang	Kota Singkawang	√	√	√

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat yang mempengaruhi pencapaian target kinerja pangan, peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

Fungsi	Program Strategis	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya	- Masih tersedianya Lahan yang	- Produksi Pangan daerah yang belum



Fungsi	Program Strategis	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	<p>Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan</p>	<p>dapat dikelola untuk mendukung produksi pangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki perbatasan antar negara - Berbatasan darat dengan satu provinsi; - Akses pangan ke daerah sumber pangan di provinsi lain melalui transportasi laut; - Panjang sungai mendukung angkutan pangan melalui transportasi sungai; - Tersedianya dukungan logistik pemerintah pusat di 7 kabupaten. 	<p>beragam dan belum optimal;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beberapa komoditas pangan yang strategis masih tergantung dengan produksi dari luar daerah; - Kecepatan pertumbuhan produksi pangan lebih lambat dari pertumbuhan jumlah penduduk; - Keterbatasan lahan produksi pangan yang berbasis kawasan; - Alih fungsi lahan dan persaingan penggunaan lahan dengan sektor non pangan dan pemukiman; - Kondisi Infrastruktur dan sarana prasarana pangan yang belum baik; - Kualitas dan kapasitas SDM yang masih rendah; - Keterbatasan kemampuan pembiayaan daerah. - Terbatasnya data dan



Fungsi	Program Strategis	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			informasi mendukung pemetaan sumber dan logistik pangan. - Melemahnya budaya lumbung pangan masyarakat.
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi beras yang surplus; - Keanekaragaman Hayati dan Plasma Nutfah lokal; - Tersedianya lokasi produksi pangan yang menyebar di beberapa wilayah (pesisir, tengah dan pedalaman) - Luasnya wilayah provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pola Konsumsi yang belum beragam dan berimbang; - Ketergantungan pada satu jenis pangan pokok, Budaya konsumsi pangan yang kurang beragam; - Pendidikan Ibu Rumah Tanggal yang masih rendah; - Tingginya pemanfaatan produk impor (terigu) sebagai pangan olahan; - Inflasi sektor pangan yang masih belum terkendali; - Belum berkembang teknologi pemanfaatan dan pengolahan pangan lokal sebagai sumber pangan pokok dan cadangan pangan; - Tingkat



Fungsi	Program Strategis	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			pendidikan rendah - kurangnya pengetahuan tentang konsumsi yang beragam dan berimbang - Kompetensi dan Kapasitas SDM Pangan yang memadai.
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	- Pertumbuhan produksi pangan dan pendapatan penduduk yang menjamin akses terhadap pangan	- Jumlah Penduduk kurang sejahtera dan rawan pangan yang tinggi - Masih terdapat daerah-daerah yang tertinggal, terpencil dan terisolasi; - Luas Provinsi dan kondisi topografi wilayah yang berat; - Kejadian bencana alam yang masih terjadi; - Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	- Pendapatan dan pendidikan mendorong kesadaran konsumsi dan akses pangan yang aman dan berkualitas. - Regulasi keamanan pangan yang	- Pencemaran bahan berbahaya dikonsumsi pada produk pangan segar asal tumbuhan; - Produk pangan segar yang kurang bersaing di pasar



Fungsi	Program Strategis	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		diperkuat	internasional; - Belum terbentuknya kelembagaan otoritas keamanan pangan - Keluar masuk pangan segar antar provinsi dan antar negara tidak dalam jaminan pemantauan dan pengawasan keamanan pangan.

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD

1) Penelaahan RTRW

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW berfungsi untuk mengarahkan pembangunan di wilayah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar wilayah, maka RTRW merupakan arahan dalam rangka pemanfaatan ruang bagi berbagai kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Pembangunan pangan, peternakan dan kesehatan hewan tidak lepas dari ketersediaan lahan yang di dalam RTRW menjadi bagian pengembangan kawasa budidaya yang terpadu sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Telaahan RTRW permasalahan pelayanan Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar ditunjukkan pada tabel 3.3 dan tabel 3.4.



Tabel 3.3 Telaahan RTRW Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat

No	Indikasi Program dan Pemanfaatan Ruang	Periode Perencanaan		Pengaruh rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD		Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
		Sd. tahun 2018	Tahun 2019-2023	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengendalian dan Pengembangan Kawasan			Ketersediaan Lahan; Keterpaduan konsep kawasan yang dituangkan dalam rencana pengembangan kawasan;	- Belum tersedianya kepastian detail tata ruang untuk pengembangan kawasan; - Belum terbangunnya Dukungan Sarpras produksi;	Tersebar di Kab/Kota yang mempunyai kawasan peternakan
1	Pengembangan dan Pengelolaan untuk sistem penggembalaan/ pastura	V		Animo Masyarakat / peternak/ pelaku usaha peternakan didaerah yang tidak potensial untuk pertanian pangan dan perkebunan untuk mengembangkan peternakan.	- Peternak/ pelaku usaha yang belum mengelompok / belum berada pada lokasi/ kawasan pengembangan; - Perubahan pemanfaatan lahan ke fungsi lainnya.	
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Produksi Peternakan	V				
3	Pengembangan Sistem Produksi melalui Agribisnis Peternakan	V	V			
	Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dari Sisi Pertumbuhan Ekonomi			Peluang integrasi dengan tanaman pangan berkelanjutan; Mendukung pembanguann pertanian pangan organik.	Kurangnya Komitmen kabupaten/ kota sebagai kawasan pangan berkelanjutan. Alih fungsi lahan yang sulit dikendalikan.	Kawasan Pertambangan Melawi, Sintang dan Kapuas Hulu
1	Pengembangan Kawasan Pertanian Berkelanjutan dengan mengedepankan swasembada pangan	V	V			
	Pengembangan Kawasan Andalan			Integrasi dengan pertanian lainnya;	Pengelolaan pertanian lainnya dikelola oleh masyarakat/	Singkawang & sekitarnya; Pontianak & sekitarnya; Ketapang &
1	Identifikasi Wilayah yang	V				



No	Indikasi Program dan Pemanfaatan Ruang	Periode Perencanaan		Pengaruh rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD		Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
		Sd. tahun 2018	Tahun 2019-2023	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	
	dapat dijadikan kawasan				swasta yang tidak mendukung terbangunnya integrasi peternakan-pertanian lainnya.	sekitarnya; Sanggau & sekitarnya; Kapuas Hulu & sekitarnya; Kawasan Andalan Laut Pontianak; Kawasan Andalan Laut Ketapang.
2	Pengembangan Kawasan Andalan sesuai dengan potensi sektor yang dimiliki	V	V			

Tabel 3.4 Pola Ruang Wilayah pada program prioritas Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program dan Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kawasan Budidaya Peternakan Sapi Potong	Kawasan Peruntukan Peternakan	Pemanfaatan ruang untuk areal peternakan	Kawasan Andalan pertanian, Sistem Jaringan prasarana utama & prasarana lainnya	Jongkong - Kab. Kapuas Hulu
2	Kawasan Budidaya Peternakan Kambing	Kawasan Peruntukan Peternakan	Pemanfaatan ruang untuk areal peternakan	Kawasan Andalan pertanian, Sistem Jaringan prasarana utama & prasarana lainnya	Seluas- Kab. Bengkayang
3	Kawasan Budidaya Peternakan Babi	Kawasan Peruntukan Peternakan	Pemanfaatan ruang untuk areal peternakan	Kawasan Andalan pertanian, Sistem Jaringan prasarana utama & prasarana lainnya	Seluas- Kab. Bengkayang
4	Kawasan Budidaya Peternakan Ayam Pedaging	Kawasan Peruntukan Peternakan	Pemanfaatan ruang untuk areal peternakan	Kawasan Andalan peternakan, Sistem Jaringan prasarana utama & prasarana lainnya	Kota Singkawang dan Kab. Kubu Raya
5	Kawasan Budidaya Peternakan ayam Ras Petelur	Kawasan Peruntukan Peternakan	Pemanfaatan ruang untuk areal peternakan	Kawasan Andalan peternakan, Sistem Jaringan prasarana utama & prasarana lainnya	Kota Singkawang dan Kab. Kubu Raya
6	Pola Budidaya Peternakan Rumah Tangga	Kawasan Peruntukan Permukiman	Pemanfaatan ruang untuk rumah tangga	PKW, Sistem Jaringan prasarana utama & prasarana	Kab. Lainnya.



No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program dan Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
			petani dengan kepadatan rendah	lainnya	

2) Analisis terhadap Dokumen KLHS

Dalam tataran strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan acuan dasar dalam mengkaji kebutuhan, perumusan tujuan dan strategi pembangunan berikut monitoring dan evaluasinya, dalam hal ini dalam konteks kewilayahan dan sektoral. Dengan demikian, KLHS adalah tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin agar tidak terjadi efek negatif terhadap lingkungan dan berkelanjutan, dipertimbangkan secara inheren dan kebijakan, rencana dan program.

KLHS bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkapan (komplimenter) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas. Penerapan KLHS dalam penataan ruang bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan AMDAL dan atau instrumen pengolahan lingkungan lainnya, dan menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategi dan partisipatif, kerja sama, lintas batas wilayah administrasi serta memperkuat pendekatan ekosistem dalam suatu wilayah. Oleh karena itu, perlu perhitungan daya dukung dan daya tampung lahan guna memperbaiki kualitas RTRW melalui perbaikan kerangka berpikir perencanaan tata ruang, yang berimplikasi pada perbaikan prosedir / proses dan metodologi / muatan perencanaan.

Telaahan KLHS terhadap Pelayanan Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar diuraikan pada Tabel 3.5

Tabel 3.5 Telaahan KLHS pada permasalahan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar

No	Aspek Kajian permasalahan pelayanan	Implikasi Terhadap Pelayanan PD	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Lahan yang masih tersedia dan untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat secara mandiri.	Jumlah untuk perkembangbiakan ditetapkan dalam perencanaan pengembangan peternakan
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Biogas dari peternakan menjadi unsur organik yang potensial dimanfaatkan untuk mendukung budidaya pertanian lainnya.	Memerlukan ruang yang besar dan terpisah dengan aktivitas manusia sehari-hari



No	Aspek Kajian permasalahan pelayanan	Implikasi Terhadap Pelayanan PD	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
3.	Kinerja laya/ jasa ekosistem	Jenis ternak yang dikembangkan sesuai dengan daya dukung iklim dan ekosistem lingkungan.	Iklim dan Ekosistem hanya sesuai untuk ternak-ternak tertentu.
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Dikembangkan berbasis agribisnis dan integrasi dengan pertanian lainnya.	Kebutuhan ruang/ lahan yang besar.
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Bibit tanaman/ ternak murni lokal lebih adaptif terhadap perubahan iklim.	Kerentanan dengan penyakit-penyakit tanaman/ ternak eksotis/ non eksotis.
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Ketahanan benih/ bibit pangan berbasis sumber daya lokal	Benih/ Bibit pangan berbasis sumber daya lokal memiliki kemampuan reproduksi dan pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan hasil persilangan. Persilangan benih/bibit untuk menghasilkan produk berkualitas berpotensi mempengaruhi data tahan terhadap geoklimatologi wilayah.

E. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis berdasarkan pada analisis lingkungan eksternal (Peluang dan Tantangan) dan analisis lingkungan internal (Kekuatan dan Kelemahan) dengan Dynamic Systems, maka isu-isu strategis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

	<p>Peluang :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan lahan untuk produksi pangan ▪ Beragamnya sumber pangan yang tersedia ▪ Adanya pintu perbatasan antar Negara ▪ Kabupaten yang berbatasan dengan provinsi lain ▪ Keragaman Geografi dan ekosistem wilayah (Laut, Sungai, Hutan, Gunung, Rawa, dll) ▪ Kebijakan Global tentang Pasar Bebas 	<p>Tantangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Skala/Lingkup pembinaan (provinsi). ▪ Lemahnya dukungan SDM dan biaya di Kabupaten/Kota. ▪ Infrastruktur dan Prasarana Pelayanan ▪ Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. ▪ Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. ▪ Tingkat kemiskinan yang masih tinggi. ▪ Bencana alam
<p>Kekuatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Perundang-Undangan ▪ Ketersediaan SDM 	<p>Isu-Isu Strategis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketersediaan pangan yang kurang beragam. 2) Produksi pangan yang 	<p>Isu Strategis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memperkuat cadangan pangan pemerintah



<p>Administrasi dan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aset dan Sarana yang tersedia ▪ Sumber Biaya (APBN dan APBD) 	<p>masih rendah. Produksi terbatas untuk pemenuhan dalam daerah.</p> <p>3) Kekayaan Sumber pangan Lokal</p> <p>4) Membangun jejaring keamanan pangan daerah.</p>	<p>2) Kurang tersosialisasinya informasi tentang tugas dan fungsi PD di masyarakat.</p> <p>3) Mendorong dan meningkatkan investasi peningkatan produksi pangan.</p> <p>4) Tingginya ketergantungan pada satu jenis pangan pokok;</p> <p>5) perlunya intervensi saat terjadi kelangkaan pangan dan atau Gejolak Harga Pangan.</p>
<p>Kelemahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lemahnya Koordinasi dengan pihak/sector terkait ▪ Pengetahuan dan Keterampilan SDM ▪ Kekurangan SDM untuk pelayanan ▪ Lemahnya manajemen dan tingkat disiplin aparatur ▪ Lemahnya kompetensi teknis ▪ Lemahnya perencanaan berbasis data dan informasi ▪ Lemahnya control dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiaaan. 	<p>Isu Strategis :</p> <p>1) Rendahnya produksi dalam daerah menyebabkan ketergantungan pangan dari luar daerah;</p> <p>2) Rendahnya tingkat keamanan Pangan Segar (asal tumbuhan dan nasal hewan) dan daya saing pasar yang rendah.</p> <p>3) Lemahnya kelembagaan pangan daerah.</p> <p>4) rendahnya kompetensi SDM Provinsi dan Kabupaten/Kota</p> <p>5) belum terbangunnya data pangan berbasis <i>e-data</i>.</p>	<p>Isu Strategis :</p> <p>1) Pola Konsumsi yang kurang beragam, seimbang dan aman.</p> <p>2) Masih adanya kejadian rawan pangan dan gizi (malnutrition)</p> <p>3) Ketersediaan pangan yang tidak merata</p> <p>4) Meningkatkan efisiensi rantai distribusi pangan</p> <p>5) Mendorong ketersediaan cadangan pangan masyarakat</p> <p>6) Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan dengan mendorong konsumsi pangan lokal.</p>



A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN

A.1 Tujuan Jangka Menengah PD

Tujuan merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan melakukan misi serta sebagai jawaban atas isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah yang sedang dan akan dihadapi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 adalah Meningkatnya Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, Ketahanan Pangan adalah Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Oleh karena itu, tujuan jangka menengah PD yang pertama mengarah kepada upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah hingga ke tingkat individu masyarakat.

A.2. Sasaran Jangka Menengah PD

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari setiap tujuan yang diimplementasikan dalam suatu program/ kegiatan. Adapun sasaran Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Terjaminnya kecukupan pangan masyarakat yang beragam secara mandiri dan berbasis sumber daya lokal

Ketahanan pangan dibangun atas tiga pilar, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan merupakan ketersediaan pangan yang berasal dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan, termasuk didalamnya bantuan pangan, apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Keterjangkauan pangan menunjukkan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan maupun kombinasi diantara keenamnya. Sedangkan pemanfaatan pangan Merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga, dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi (konversi zat gizi secara efisien oleh tubuh).

Dengan meningkatnya ketersediaan pangan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang



berkeadilan bagi setiap lapisan masyarakat sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pemenuhan konsumsi pangan seyogyanya tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas, tetapi yang juga tidak kalah pentingnya kualitas konsumsi pangan atau keanekaragaman konsumsi pangan dengan gizi berimbang. Proporsi energi dari setiap kelompok pangan terhadap total anjuran konsumsi energi memberikan gambaran kualitas atau keragaman dan keseimbangan gizi, yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Konsumsi pangan di Kalimantan Barat menunjukkan ketergantungan pada satu jenis pangan. Pola tersebut akan mengakibatkan konsumsi total meningkat dan menuntut produksi total yang tinggi pula. Oleh karena itu, jika terjadi sedikit saja gangguan pada ketersediaan pangan tertentu tersebut, akan berakibat besar pada sistem ketahanan pangan daerah dan nasional. Terlebih dengan ketergantungan terhadap satu jenis pangan pokok, yaitu beras. Apabila konsumsi pangan masih didominasi oleh beras sebagai sumber karbohidrat, maka akan memberatkan upaya pemantapan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan bertumpu kepada sumber daya lokal. Diversifikasi pangan menjadi sangat penting untuk dilakukan agar tidak terjadi ketergantungan yang sangat tinggi pada jenis pangan tertentu saja seperti beras.

Perkembangan konsumsi protein baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional menunjukkan sumber yang lebih beragam, yaitu protein hewani asal ikan dan asal ternak. Bahkan protein nabati, juga berkontribusi atas pemenuhan protein masyarakat.

Untuk kelangsungan hidup, manusia membutuhkan asupan makanan untuk menunjang semua aktivitas serta produktif. Selain karbohidrat dan protein, sumber vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk mengatur metabolisme agar mencapai keseimbangan adalah sayur dan buah. Perkembangan pola konsumsi pangan di Kalimantan Barat menunjukkan konsumsi sayur dan buah yang sangat rendah. Selain aspek pengetahuan dan budaya, pendapatan masyarakat juga berpengaruh terhadap rendahnya konsumsi masyarakat terhadap kelompok pangan sayur dan buah.

2. Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar

Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan bertujuan untuk mendukung dan mengoptimalkan fungsi sumber daya Dinas ketahanan pangan untuk mencapai sasaran Terjaminnya kecukupan pangan masyarakat yang beragam secara mandiri dan berbasis sumber daya lokal.



Indikator dari sasaran ini adalah :

2.1 Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong seluruh Perangkat Daerah, berkontribusi dan melakukan percepatan Reformasi Birokrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas tata Kelola Perangkat Daerah agar tercipta birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.

Indikator ini menunjukkan upaya Perangkat daerah dalam rangka mendukung Daerah untuk melakukan pembaharuan dan per aspek-aspek kelembagaan (organisasi) bahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya aparatur

2.2 Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan

Implementasi dari Reformasi Birokrasi suatu organisasi dimulai dengan akuntabilitas kinerja organisasi yang dilaksanakan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Komponen SAKIP terdiri dari :

1. Perencanaan Strategis;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Internal;
5. Pencapaian Kinerja.

Untuk memudahkan melakukan pengukuran atas capaian sasaran PD, maka Indikator dan Target capaian tahun 2019-2023 dirumuskan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.1.



Tabel 4.1 Matriks Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada tahun				
				2019	2021	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan		Indeks Ketahanan Pangan Provinsi	55,17	56,79	57,69	59,04	60,91
		1) Terjaminnya kecukupan pangan masyarakat yang beragam secara mandiri dan berbasis sumber daya lokal	Skor Pola Pangan Harapan	75,66	77,53	79,40	81,27	83,13
		2) Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar	n/a	n/a	n/a	B (65,00)	BB (70,00)
			Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar	n/a	n/a	BB (75,00)	BB (75,00)	A (80,00)



B. Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan dan sasaran PD dirumuskan untuk mendukung tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat.

Misi Gubernur Kalimantan Barat tahun 2018-2023 yang ditugaskan untuk dapat dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat adalah Misi ketiga yaitu **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif** dan Misi keempat yaitu **Mewujudkan masyarakat sejahtera**. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mewujudkan masyarakat sejahtera yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.

Tujuan dan sasaran RPJMD adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Maka tujuan dari Misi Mewujudkan Masyarakat Sejahtera adalah meningkatkan perekonomian masyarakat dengan indikator pertumbuhan ekonomi dan investasi meningkat.



Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu PD yang tujuan dan sasarannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas sektor pertanian-sub sektor peternakan.

Hubungan antara tujuan dan sasaran PD dengan tujuan dan sasaran RPJMD dituangkan pada table 4.2.



Tabel 4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dan PD

No	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator	Target					Tujuan PD	Sasaran PD
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif	Meningkatkannya kualitas SDM	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	55,17	56,79	57,69	59,04	60,91	Meningkatnya Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan	1) Terjaminnya kecukupan pangan masyarakat yang beragam secara mandiri dan berbasis sumber daya local 2) Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar



A. Strategi

BAB 5. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah yang harus dilakukan berisi program-program indikatif guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan. Adapun strategi yang disusun Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 agar

tercapainya Peningkatan Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan adalah menguatkan pengelolaan dan pemanfaatan cadangan pangan, menjaga stabilitas distribusi dan harga pangan, meningkatkan kecukupan konsumsi energi, protein masyarakat yang memenuhi kaidah keragaman sumber pangan dan keseimbangan gizi berbasis sumberdaya lokal.

B. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan dari setiap tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 adalah Meningkatnya Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan adalah Pemantapan Ketahanan Pangan daerah menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Matriks hubungan antara tujuan dan sasaran OPD dan Strategi serta arah kebijakan PD ditunjukkan pada tabel 5.1.

Tabel 5.1 Matriks Hubungan Tujuan OPD, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif				
Misi ke-3 : Meningkatkan kualitas SDM				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan	1) Terjaminnya kecukupan pangan masyarakat yang beragam secara mandiri dan berbasis sumber daya lokal 2) Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar	1) Menguatkan Pengelolaan dan pemanfaatan cadangan pangan, menjaga stabilitas distribusi dan harga pangan, meningkatkan kecukupan konsumsi energi, protein masyarakat yang memenuhi kaidah keragaman sumber pangan dan keseimbangan gizi berbasis sumber daya lokal 2) meningkatkan kualitas Tata kelola Sumber daya Dinas Ketahanan Pangan untuk pelayanan yang optimal	Pemantapan Ketahanan Pangan daerah menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan



BAB 6. **RENCANA PROGRAM** **DAN KEGIATAN**

Sebagai perwujudan kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan dalam program dan kegiatan beserta kebutuhan pendanaan indikatif dan bertahap selama lima tahun.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah tertuang dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program yang berperan sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Gubernur. Setiap program memiliki kegiatan yang merupakan tindakan nyata yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Perumusan Rencana Program, Kegiatan serta indikasi Pendanaan di tampilkan pada tabel 6.1.

TABEL 6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN 2018-2023
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2023

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Perangkat Daerah	Lokasi	
							2019		2020		2021		2022		2023					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp Jt.	Target	Rp Jt.	Target	Rp Jt.				Target
URUSAN PANGAN + PENUNJANG								-		-		28.741		35.991		43.200		106.230		
URUSAN PANGAN								-		-		9.226		13.194		17.620		40.040		
DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar)																				
I	Meningkatnya Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan			Indeks Ketahanan Pangan Provinsi	Nilai	n/a	55,17	-	56,79	-	57,69	9.226	59,04	13.194	60,91	17.620	60,91	40.040	Dinas Ketahanan Pangan	
1.	Terjaminnya kecukupan pangan masyarakat yang beragam secara mandiri dan berbasis sumber daya lokal			Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	73,8	75,66	-	77,53	-	79,40	9.226	81,27	13.194	83,13	17.620	83,13	40.040	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Indeks Ketersediaan Pangan Provinsi	Nilai	n/a	78,72	-	78,75	-	79,00	4.449	79,00	7.300	80,00	11.300	80,00	23.049		
		2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi					-		-		4.449		7.300		11.300		23.049		
		2.09.02.1.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Unit	n/a	n/a	-	n/a	-	2 Unit	430	4 Unit	1.000	8 Unit	2.000	14 Unit	3.430		
		2.09.02.1.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	Unit	n/a	n/a	-	n/a	-	27 Unit	3.828	15 Unit	3.000	30 Unit	6.000	65 Unit	12.828		
		2.09.02.1.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Unit	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	14 Unit	3.000	14 Unit	3.000	28 Unit	6.000		
		2.09.02.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	1 Laporan	100	1 Laporan	100	2 Laporan	200		
		2.09.02.1.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Dokumen	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Dokumen	191	1 Dokumen	200	1 Dokumen	200	1 Dokumen	591		
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Konsumsi energi penduduk		1.838 Kkal/Kap/Hr	1.857 Kkal/Kap/Hr	-	1.896 Kkal/Kap/Hr	-	1.917 Kkal/Kap/Hr	4.137	1.938 Kkal/Kap/Hr	4.624	1.958 Kkal/Kap/Hr	4.985	1.958 Kkal/Kap/Hr	13.745		
				Konsumsi Protein Penduduk		55,6 Gr.Prot/Kap/Hr	56,1 Gr.Prot/Kap/Hr		56,3 Gr.Prot/Kap/Hr		56,5 Gr.Prot/Kap/Hr		56,7 Gr.Prot/Kap/Hr		57,0 Gr.Prot/Kap/Hr		57,0 Gr.Prot/Kap/Hr			
				Konsumsi Beras Penduduk		93,5 Kg/Kap/Thn	93,4 Kg/Kap/Thn		93,3 Kg/Kap/Thn		93,1 Kg/Kap/Thn		93,0 Kg/Kap/Thn		92,9 Kg/Kap/Thn		92,9 Kg/Kap/Thn			
				Coefisient Varian (CV) harga beras di tingkat konsumen		1,67	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00			
				Penguatan Cadangan Pangan Provinsi		43,90 Persen	40,00 Persen		40,00 Persen		40,00 Persen		40,00 Persen		40,00 Persen		40,00%			
				Ketersediaan Energi		2.975 Kkal/Kap/Hr	3.054 Kkal/Kap/Hr		3.085 Kkal/Kap/Hr		3.131 Kkal/Kap/Hr		3178 Kkal/Kap/Hr		3.226 Kkal/Kap/Hr		3226 Kkal/Kap/Hr			
				Ketersediaan Protein		77,3 Gr.Prot/Kap/Hr	78,7 Gr.Prot/Kap/Hr		79,2 Gr.Prot/Kap/Hr		79,6 Gr.Prot/Kap/Hr		80,1 Gr.Prot/Kap/Hr		80,5 Gr.Prot/Kap/Hr		80,5 Gr.Prot/Kap/Hr			
		2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					-		-		1.234		1.449		1.510		4.193		

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp Jt.	Target	Rp Jt.	Target	Rp Jt.			Target	Rp Jt.
		2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan yang tersedia	Laporan	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	1 Laporan	50	1 Laporan	50	1 Laporan	100		
		2.09.03.1.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Laporan	160	1 Laporan	180	1 Laporan	180	1 Laporan	520		
		2.09.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Laporan	263	1 Laporan	264	1 Laporan	270	1 Laporan	797		
		2.09.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Dokumen	138	1 Dokumen	150	1 Dokumen	160	3 Dokumen	448		
		2.09.03.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	n/a	n/a	-	n/a	-	42 Unit	437	42 Unit	540	42 Unit	560	126 Unit	1.538		
		2.09.03.1.01.06	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Dokumen	236	1 Dokumen	264	1 Dokumen	290	3 Dokumen	790		
		2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi					-		-	2.477		2.625		2.695		7.797			
		2.09.03.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Laporan	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Laporan	62	1 Laporan	65	1 Laporan	70	3 Laporan	197		
		2.09.03.1.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	2 Dokumen	100		
		2.09.03.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Laporan	2.404	1 Laporan	2.450	1 Laporan	2.500	3 Laporan	7.354		
		2.09.03.1.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	Ton	n/a	n/a	-	n/a	-	200 Ton	12	200 Ton	60	200 Ton	75	200 Ton	147		
		2.09.03.1.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat					-		-			50		50		100			
		2.09.03.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	1 Laporan	50	1 Laporan	50	2 Laporan	100		
		2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi					-		-	425		500		730		1.655			
		2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Dokumen	80	1 Dokumen	290	1 Dokumen	520	3 Dokumen	890		

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Perangkat Daerah	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp Jt.	Target	Rp Jt.	Target	Rp Jt.	Target	Rp Jt.		
		2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Laporan	345	1 Laporan	150	1 Laporan	150	3 Laporan	645		
		2.09.03.1.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	1 Laporan	60	1 Laporan	60	2 Laporan	120		
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Tingkat Kerawanan Pangan		16,96 Persen	16,00 Persen	-	15,00 Persen	-	14,00 Persen	276	13,00 Persen	305	12,00 Persen	355	12,00 Persen	936	disketpangan	
		2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi					-		-		86		90		90		266		
		2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Dokumen	86	1 Dokumen	90	1 Dokumen	90	3 Dokumen	266		
		2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi					-		-		190		215		265		670		
		2.09.04.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Dokumen	63	1 Dokumen	65	1 Dokumen	65	3 Dokumen	193		
		2.09.04.1.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Dokumen	127	1 Dokumen	150	1 Dokumen	200	3 Dokumen	477		
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan		78,70 Persen	80,00 Persen	-	82,00 Persen	-	84,00 Persen	364	88,00 Persen	965	90,00 Persen	980	90,00 Persen	2.309		
		2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					-		-		364		965		980		2.309		
		2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	Dokumen	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Dokumen	56	1 Dokumen	60	1 Dokumen	60	3 Dokumen	176		
		2.09.05.1.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat	n/a	n/a	-	n/a	-	2 sertifikat	54	4 Sertifikat	75	6 Sertifikat	90	12 Sertifikat	219		
		2.09.05.1.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Dokumen	7	1 Dokumen	80	1 Dokumen	80	3 Dokumen	167		
		2.09.05.1.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Dokumen	196	1 Dokumen	400	1 Dokumen	400	3 Dokumen	996		

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Perangkat Daerah	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp Jt.	Target	Rp Jt.	Target	Rp Jt.	Target	Rp Jt.		
		2.09.05.1.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dokumen	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Dokumen	52	1 Dokumen	350	1 Dokumen	350	3 Dokumen	752		
	URUSAN PENUNJANG							-		-		19.514		22.797		25.580		66.190		
2.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar											19.514		22.797		25.580		66.190	Dinas Ketahanan Pangan	
				Nilai IRB Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar		n/a	n/a		n/a	-			B (65,00)		BB (70,00)		BB (70,00)		Dinas Ketahanan Pangan	
				Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar		n/a	n/a		n/a	BB (75,00)			BB (75,00)		A (80,00)		A (80,00)		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persen penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, beserta pelaporannya yang sesuai dan tepat waktu		n/a	n/a	-	n/a	-	90,00 Persen	231	90,00 Persen	260	90,00 Persen	280	90,00 Persen	771		
		2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					-		-		231		260		280		771		
		2.09.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	n/a	n/a	-	n/a	-	3 Dokumen	101	2 Dokumen	100	3 Dokumen	120	8 Dokumen	321		
		2.09.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Dokumen	16	1 Dokumen	20	1 Dokumen	20	3 Dokumen	56		
		2.09.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Dokumen	12	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	3 Dokumen	42		
		2.09.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Dokumen	13	1 Dokumen	20	1 Dokumen	20	3 Dokumen	53		
		2.09.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Dokumen	11	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	3 Dokumen	41		
		2.09.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	n/a	n/a	-	n/a	-	3 Laporan	25	3 Laporan	30	3 Laporan	30	9 Laporan	85		
		2.09.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	n/a	n/a	-	n/a	-	4 Laporan	52	4 Laporan	60	4 Laporan	60	12 Laporan	172		

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp Jt.	Target	Rp Jt.	Target	Rp Jt.			Target	Rp Jt.
		2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persen Serapan Anggaran OPD		n/a	n/a	-	n/a	-	95,00 Persen	15.171	95,00 Persen	15.580	95,00 Persen	15.880	95,00 Persen	46.631		
		2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					-		-	15.171		15.580		15.880		46.631			
		2.09.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ Bulan	n/a	n/a	-	n/a	-	720 OB	14.871	720 OB	15.200	720 OB	15.500	720 OB	45.571		
		2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	1 Dokumen	300		
		2.09.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Dokumen	177	1 Dokumen	200	1 Dokumen	200	1 Dokumen	577		
		2.09.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Dokumen	16	1 Dokumen	20	1 Dokumen	20	1 Dokumen	56		
		2.09.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	1 Laporan	10	1 Laporan	10	1 Laporan	20		
		2.09.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	1 Dokumen	20	1 Dokumen	20	1 Dokumen	40		
		2.09.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	n/a	n/a	-	n/a	-	12 Laporan	5	12 Laporan	20	12 Laporan	20	12 Laporan	45		
		2.09.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	2 Laporan	10	2 Laporan	10	2 Laporan	20		
		2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persen Barang Milik daerah yang tersedia dan berfungsi sesuai pencatatan dan terdokumentasi (Persen)		n/a	n/a	-	n/a	-	90,00 Persen	51	90,00 Persen	136	90,00 Persen	242	90,00 Persen	428		
		2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					-		-	51		136		242		428			
		2.09.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	2 Dokumen	20	2 Dokumen	20	2 Dokumen	40		
		2.09.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	2 Jenis	50	2 Jenis	50	2 Jenis	100		
		2.09.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	1 Laporan	10	1 Laporan	10	1 Laporan	20		

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Keigatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Perangkat Daerah	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp Jt.	Target	Rp Jt.	Target	Rp Jt.	Target	Rp Jt.		
		2.09.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	1 Laporan	50	1 Laporan	50		
		2.09.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	1 Laporan	50	1 Laporan	50		
		2.09.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	n/a	n/a	-	n/a	-	2 Laporan	15	2 Laporan	16	2 Laporan	18	2 Laporan	49		
		2.09.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Dokumen	36	1 Dokumen	40	1 Dokumen	44	1 Dokumen	119		
		2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pegawai dengan nilai kinerja "baik"		n/a	n/a	-	n/a	-	90,00 Persen	180	90,00 Persen	219	90,00 Persen	230	90,00 Persen	629		
		2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					-		-		180		219		230		629		
		2.09.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-		
		2.09.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	n/a	n/a	-	n/a	-	100 paket	72	100 paket	80	100 paket	80	300 paket	232		
		2.09.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	1 Dokumen	20	1 Dokumen	20	1 Dokumen	40		
		2.09.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Dokumen	19	1 Dokumen	21	1 Dokumen	23	1 Dokumen	62		
		2.09.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Dokumen	19	1 Dokumen	21	1 Dokumen	23	1 Dokumen	62		
		2.09.01.1.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-		
		2.09.01.1.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-		
		2.09.01.1.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-		
		2.09.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	n/a	n/a	-	n/a	-	30	43	30,00	48	30,00	53	30	144		
		2.09.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	n/a	n/a	-	n/a	-	2	6	2,00	7	2,00	7	2	20		
		2.09.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	n/a	n/a	-	n/a	-	24	21	24,00	23	24,00	25	24	69		

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Perangkat Daerah	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp Jt.		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp Jt.	Target	Rp Jt.	Target	Rp Jt.				
		2.09.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-		
		2.09.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	n/a	n/a	-	n/a	-	2 Paket	52	2 Paket	57	2 Paket	63	6 Paket	173		
		2.09.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	n/a	n/a	-	n/a	-	4 Unit	347	4 Unit	395	12 Unit	431	12 Unit	1.173		
		2.09.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	2 Unit	200	2 Unit	200		
		2.09.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	1 Unit	200	1 Unit	200		
		2.09.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	1 Unit	700	1 Unit	1.500	1 Unit	1.500		
		2.09.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	1 Unit	700	1 Unit	1.500	1 Unit	1.500		
		2.09.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	1 Unit	200	1 Unit	400	1 Unit	400		
		2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Kepuasan Layanan Internal		n/a	n/a	-	n/a	-	A	2.004	A	2.201	A	2.239	A	6.445		
		2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-		-	2.004		2.201		2.239		6.445			
		2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Laporan	5	1 Laporan	5	1 Laporan	6	3 Laporan	17		
		2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Laporan	357	1 Laporan	376	1 Laporan	413	3 Laporan	1.146		
		2.09.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	1 Laporan	20	1 Laporan	20	2 Laporan	40		
		2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Laporan	1.642	1 Laporan	1.800	1 Laporan	1.800	3 Laporan	5.242		
		2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persen Barang Milik daerah yang tersedia dan berfungsi sesuai pencatatan dan terdokumentasi (Persen)		n/a	n/a	-	n/a	-	90,00 Persen	1.087	90,00 Persen	1.754	90,00 Persen	1.790	90,00 Persen	4.531		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-		-	1.087		1.754		1.790		4.531			

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Perangkat Daerah	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp Jt.	Target	Rp Jt.	Target	Rp Jt.	Target	Rp Jt.		
		2.09.01.1.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Unit	50	1 Unit	50	1 Unit	50	1 Unit	150		
		2.09.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	n/a	n/a	-	n/a	-	8 Unit	278	8 Unit	290	8 Unit	300	8 Unit	868		
		2.09.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-		
		2.09.01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-		
		2.09.01.1.09.04	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	3 Unit	20	5 Unit	20	3 Unit	40		
		2.09.01.1.09.05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	n/a	n/a	-	n/a	-	3 Unit	12	3 Unit	15	3 Unit	15	3 Unit	42		
		2.09.01.1.09.06	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-		
		2.09.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-		
		2.09.01.1.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Unit	200	1 Unit	800	1 Unit	800	3 Unit	1.700		
		2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Unit	186	1 Unit	200	1 Unit	200	3 Unit	586		
		2.09.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Unit	163	1 Unit	165	1 Unit	170	1 Unit	498		
		2.09.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	n/a	n/a	-	n/a	-	0,1 Hektar	197	0,15 Hektar	214	0,15 Hektar	235	0,4 Hektar	647		



A. Rumusan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Pangan dan Pertanian-Peternakan

**BAB 7.
KINERJA
PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 memuat beberapa misi yang akan dilaksanakan selama lima tahun dan berhubungan dengan pelayanan tugas dan fungsi di bidang Pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.

Rumusan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Pangan dari dokumen perencanaan daerah dan OPD adalah sebagai berikut :

Visi	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
Misi ke-3	Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif
Tujuan RPJMD	Meningkatnya kualitas SDM
Sasaran RPJMD/ Tujuan PD	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah ➤ Meningkatnya Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan
Sasaran PD	1. Terjaminnya kecukupan pangan masyarakat yang beragam secara mandiri dan berbasis sumber daya local 2. Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar
Strategi PD	Menguatkan Pengelolaan dan pemanfaatan cadangan pangan, menjaga stabilitas distribusi dan harga pangan, meningkatkan kecukupan konsumsi energi, protein masyarakat yang memenuhi kaidah keragaman sumber pangan dan keseimbangan gizi berbasis sumber daya lokal
Kebijakan PD	Pemantapan Ketahanan Pangan daerah menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan
Program	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi



B. Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja adalah Unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan suatu kegiatan/program atau mencapai tujuan dan sasaran tertentu, sedangkan Indikator Kinerja merupakan suatu variabel yang digunakan untuk mengukur sebuah perubahan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu kondisi.

Indikator Kinerja yang dirumuskan untuk menjawab tujuan RPJMD yang dirumuskan dalam indikator penyelenggaraan bidang urusan PD dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Pelayanan ditunjukkan pada tabel 7.1 – tabel 7.3.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian 2019-2023
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2018	Target Capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,26	67,2	67,87	68,69	69,68	70,78	70,78

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan dan Target Capaian 2019-2023
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Sasaran RPJMD/ Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2017	Target Capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,26	67,2	67,87	68,69	69,68	70,78	70,78
	ASPEK PELAYANAN UMUM :							
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar:							
	Pangan							
	Sasaran RPJMD ke-1: Meningkatkan Ketahanan							



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Sasaran RPJMD/ Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2017	Target Capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	Pangan Daerah							
	Indeks Ketahanan Pangan Provinsi (Indeks)	n/a	55,17	56,79	57,69	59,04	60,91	60,91

Tabel 7.3 Indikator Sasaran PD dan Target Capaian 2019-2023
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat

No	Indikator Sasaran PD	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2017	Target Capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran PD 1: Meningkatnya Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan							
1	Skor PPH (Pola pangan Harapan)	73,8	75,66	77,53	79,4	81,27	83,13	83,13
	Sasaran PD 2: Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar							
1	Nilai IRB Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar	n/a	n/a	n/a	n/a	B (65,00)	BB (70,00)	BB (70,00)
2	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar	n/a	n/a	n/a	BB (75,00)	BB (75,00)	A (80,00)	A (80,00)



BAB 8. PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan adalah dokumen perencanaan urusan wajib bukan pelayanan dengan bidang urusan pangan untuk periode 5 (lima) tahun menindaklanjuti dinamika perubahan perencanaan tingkat provinsi dan tingkat nasional. Renstra ini disusun dalam rangka mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/ urusan pangan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Perubahan Tahun 2018-2023 dan menyesuaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Perubahan Tahun 2018-2023 dan perubahannya, untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kalimantan Barat dan Indikator Sub Kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana tertuang dalam Tabel 6.1.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat. Karena itu, Renstra harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Barat. Harus dipastikan dalam program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang urusan pangan dan atau target kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat yang akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat di masa yang akan datang.



Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih baik berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat ini.

Pontianak, Januari 2022

Kepala Dinas



HERONIMUS HERO, SP, M.Si
NIP. 197404031998031004



Lampiran 1.

Defenisi dan Rumus Indikator Kinerja Utama

A. Sasaran RPJMD/ Tujuan Renstra

1. Indeks Ketahanan Pangan

Defenisi	Merupakan instrument yang memberikan gambaran ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro, tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi panganyang didukung oleh perbaikan infrastruktur.
Satuan	-
Rumus :	$Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$ <p>Dimana:</p> <p>i : Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9</p> <p>j : Kabupaten ke-1, 2, 3, ... 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, ... 96, 97, dan 98</p> <p>Y_j : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j</p> <p>a_i : Bobot masing-masing indikator ke-i</p> <p>X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j</p>
Data	Susenas BPS, BKP Kementan RI, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar

1.

B. Sasaran PD

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Defenisi	Merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan utama (9 kelompok pangan utama) yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya.
Satuan	-
Rumus :	$PPH = \sum_i^{ix} PPH_{(i-ix)}$ $PPH_{i-ix} = \frac{Ep_{(i-ix)}}{AKE \text{ Konsumsi}} \times 100 \times \text{bobot}_{(i-ix)}$ <p>Ket:</p> <p>PPH = Skor Pola Pangan Harapan</p> <p>$PPH_{(i-ix)}$ = Skor PPH Kelompok Pangan (i-ix)</p> <p>Ep_{i-ix} = Konsumsi Energi Kelompok Pangan (i-ix)</p> <p>AKE = Angka Kecukupan Energi (2.000 kkal/kap/hari)</p> <p>konsumsi</p> <p>Bobot_{i-ix} = Bobot Kelompok Pangan (i-ix)</p> <p>$i=0,5; ii=0,5; iii=2,0; iv=0,5; v=0,5; vi=2; vii=0,5; viii=5,0; ix=0,00$</p> <p>Catatan : Skor PPH_{i-ix} tidak lebih dari Skor PPH_{i-ix} Max ($PPH_{imax}=25; PPH_{iimax}=2,5; PPH_{iivmax}=24,0; PPH_{iivmax}=5,0; PPH_{vmax}=1,0; PPH_{vmax}=10,0; PPH_{viimax}=2,5; PPH_{viimax}=30,0; PPH_{ixmax}=0,00$)</p>
Data	Susenas BPS, BKP Kementan RI, DPPKH Provinsi Kalbar



2. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

Defenisi	Indikator yang menunjukkan upaya Perangkat daerah dalam rangka mendukung Daerah untuk melakukan pembaharuan dan perub aspek-aspek kelembagaan (organisasi bahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya aparatur. Penilaian sesuai Lembar Evaluasi
Satuan	Nilai
Rumus :	$y_n = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 + x_9 + x_{10} + x_{11}$
	Keterangan: y_n = Nilai Implementasi RB x_1 = Nilai Manajemen Perubahan (5) x_2 = Nilai Penataan Peraturan Perundang-undangan (5) x_3 = Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi (6) x_4 = Penataan Tata Laksana (5) x_5 = Penataan Sistem Manajemen SDM (15) x_6 = Penguatan Akuntabilitas (6) x_7 = Penguatan Pengawasan (12) x_8 = Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6) x_9 = Nilai Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (20) x_{10} = Kualitas pelayanan Publik (10) x_{11} = Nilai Pemerintah yang bebas dari Korupsi dan Bebas KKN (10)
Sumber	Inspektorat Provinsi Kalbar

3. Nilai SAKIP OPD

Defenisi	Indikator yang menunjukkan penilaian atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Evaluasi kinerja OPD sebagai entitas Pemerintahan Daerah dalam implementasi SAKIP dinilai dengan Nilai SAKIP OPD.
Satuan	Nilai
Rumus :	$y_n = 30\% \cdot x_1 + 25\% \cdot x_2 + 15\% \cdot x_3 + 10\% \cdot x_4 + 20\% \cdot x_5$
	Keterangan: y_n = Nilai SAKIP OPD x_1 = Nilai HE Perencanaan Kinerja x_2 = Nilai HE Pengukuran Kinerja x_3 = Nilai HE Pelaporan Kinerja x_4 = Nilai HE Evaluasi Internal x_5 = Nilai HE Pencapaian Kinerja
Sumber	Susenas BPS, BKP Kementan RI, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar



Lampiran 2.

Defenisi dan Rumus Indikator Kinerja Penyelenggaraan

Defenisi dari Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sesuai Tujuan RPJMD dan Sasaran PD adalah sebagai berikut:

1. Jumlah konsumsi energi

Defenisi	Jumlah Total Energi dari 9 kelompok bahan pangan yang dikonsumsi per kapita per hari.
Satuan	Kkal/kap/hari
Rumus :	$E_t = \sum_{p1}^{p9} E_{pi-ix}$ Ket : E_t = Total Konsumsi Energi (9 kelompok pangan) E_{pi} = Konsumsi Energi Padi-Padian E_{pii} = Konsumsi Energi Umbi-umbian E_{piii} = Konsumsi Energi Pangan Hewani E_{piv} = Konsumsi Energi Minyak dan Lemak E_{pv} = Konsumsi Energi Buah/ Biji Berminyak E_{pvi} = Konsumsi Energi Kacang-Kacangan E_{pvii} = Konsumsi Energi Gula E_{pviii} = Konsumsi Energi Sayur dan Buah E_{pix} = Konsumsi Energi Lain-lain
Sumber Data	Susenas BPS, BKP Kementan RI, DPPKH Provinsi Kalbar

2. Jumlah konsumsi protein

Defenisi	Jumlah Total Protein dari 9 kelompok bahan pangan yang dikonsumsi per kapita per hari.
Satuan	Gram protein/kapita/hari
Rumus :	$Prot_t = \sum_{pi}^{pix} Prot_{pi-ix}$ Ket : $Prot_t$ = Total Konsumsi Protein (9 kelompok pangan) $Prot_{p1}$ = Konsumsi Protein Padi-Padian $Prot_{p2}$ = Konsumsi Protein Umbi-umbian $Prot_{p3}$ = Konsumsi Protein Pangan Hewani $Prot_{p4}$ = Konsumsi Protein Minyak dan Lemak $Prot_{p5}$ = Konsumsi Protein Buah/ Biji Berminyak $Prot_{p6}$ = Konsumsi Protein Kacang-Kacangan $Prot_{p7}$ = Konsumsi Protein Gula $Prot_{p8}$ = Konsumsi Protein Sayur dan Buah $Prot_{p9}$ = Konsumsi Protein Lain-lain
Sumber Data	Susenas BPS, BKP Kementan RI, DPPKH Provinsi Kalbar



3. Jumlah konsumsi beras penduduk (tingkat konsumsi beras)

Defenisi	Jumlah konsumsi beras per kapita per tahun pada suatu wilayah.
Satuan	Kg/kap/tahun
Rumus :	TKB = RC x BDD (100/100) Ket : TKB = Tingkat Konsumsi Beras RC = Total Beras yang dikonsumsi penduduk pada suatu wilayah tahun T (kg/kap/tahun) BDD = Berat yang Dapat Dimakan (Beras = 100%)
Sumber Data	Susenas BPS, BKP Kementan RI, DPPKH Provinsi Kalbar

4. Persen tingkat keamanan pangan asal hewan

Defenisi	Persentase pangan segar asal hewan yang aman dikonsumsi bebas dari cemaran mikroba, pestisida, dan atau logam serta bahan tambahan makanan berbahaya lainnya.
Rumus :	$= \frac{\text{Jumlah sample pangan segar yang aman}}{\text{Total Sampel Pangan segar yang diuji}} \times 100\%$
Sumber Data	DPPKH Provinsi Kalbar

5. Jumlah ketersediaan energi

Defenisi	Sejumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk suatu negara atau daerah dalam suatu kurun waktu tertentu dalam bentuk energi.
Satuan	kkal/kap/hr
Rumus :	$Fdi = Oi - (\Delta St)_i + Mi - Xi - (F+S+I+W)_i$ $EA = \sum_1^{11} (Fdi \times energy_i \times \frac{BDD}{100} \times \frac{1000}{Pddix365})$ Ket: F _i = Ketersediaan Pangan – i pada suatu Wilayah O _i = Produksi (Input/Output) pangan-i (ΔSt) _i = Perubahan Stock pangan-i M _i = Impor pangan-i X _i = Ekspor pangan-i F _i = Pakan pangan-i S _i = Bibit pangan-i I _i = Industri pangan-i W _i = Tercecer pangan-i EA = Ketersediaan Energi energy _i = Nilai Energi Bahan Pangan – i BDD _i = Bagian yang Dapat Dimakan pangan-i Pdd _i = Jumlah Penduduk Tengah waktu Tahun-t
Sumber Data	BPS, BKP Kementan RI, DPPKH Provinsi Kalbar, OPD terkait (sektor pertanian, perikanan kelautan, industry, perdagangan dan Karantina)

6. Jumlah ketersediaan protein

Defenisi	Sejumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk suatu negara atau daerah dalam suatu kurun waktu tertentu dalam bentuk protein.
Satuan	gram protein/kap/hr
Rumus :	$Fdi = Oi - (\Delta St)_i + Mi - Xi - (F+S+I+W)_i$ $Prot.A = \sum_1^{11} (Fdi \times protein_i \times \frac{BDD}{100} \times \frac{1000}{Pddix365})$



	<p>Ket:</p> <p>Fd_i = Ketersediaan Pangan – i pada suatu Wilayah</p> <p>O_i = Produksi (Input/Output) pangan-i</p> <p>$(\Delta St)_i$ = Perubahan Stock pangan-i</p> <p>M_i = Impor pangan-i</p> <p>X_i = Ekspor pangan-i</p> <p>F_i = Pakan pangan-i</p> <p>S_i = Bibit pangan-i</p> <p>li = Industri pangan-i</p> <p>Wi = Tercecer pangan-i</p> <p>Prot.A = Ketersediaan Protein</p> <p>protein_i = Nilai Protein Bahan Pangan – i</p> <p>BDD_i = Bagian yang Dapat Dimakan pangan-i</p> <p>Pdd_i = Jumlah Penduduk Tengah waktu Tahun-t</p>
Sumber Data	BPS, BKP Kementan RI, DPPKH Provinsi Kalbar, OPD terkait (sektor pertanian, perikanan kelautan, industry, perdagangan, dan Karantina)

7. Angka koefisien varian harga beras di tingkat konsumen

Defenisi	Tingkat keragaman harga beras di tingkat konsumen pada satu wilayah dalam suatu <i>time series</i> (mingguan-bulanan-tahunan). Semakin tinggi keragaman harga dalam satu tahun, maka harga semakin tidak stabil.
Satuan	-
Rumus :	$CV = \frac{STD.Harga\ beras}{Harga\ rata-rata} \times 100\%$ <p>Ket:</p> <p>CV = Coefitient varian (koefisien keragaman)</p> <p>STD = Standar Deviasi</p>
Sumber Data	BKP Kementan RI, DPPKH Provinsi Kalbar

8. Angka rawan pangan (persentase penduduk rawan pangan)

Defenisi	<p>1) Tingkat Rawan Pangan Penduduk berdasarkan <i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i>, yaitu prevalensi penduduk dengan konsumsi kalori < 70 persen AKG atau setara 1.400 kkal/kap/hari</p> <p>2) Tingkat Rawan Pangan Wilayah berdasarkan jumlah wilayah rawan pangan</p>
Rumus : ARP	<p>1) PoU</p> $= \frac{\text{Banyaknya penduduk dengan konsumsi kalori} < 1.400 \text{ kkal perkapita}}{1000 \text{ orang penduduk dengan golongan pengeluaran tertentu}} \times 100\%$ <p>2) Kerawanan pangan wilayah</p> $= \frac{\text{Jumlah kecamatan rawan pangan (Prioritas 1 sd 3)}}{\text{Total JUmlah Kecamatan}} \times 100\%$
Sumber Data	BPS



9. Persen tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan

Defenisi	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan																	
Rumus :	<p>a. Pengawasan di peredaran (60%), Keamanan pangan tingkat peredaran (x_a)</p> $x_a = \frac{\text{Jumlah sample pangan segar yang aman di peredaran}}{\text{Total Sampel Pangan segar yang diuji}} \times 100\%$ <p>b. Sertifikasi dan registrasi (40%), Capaian Keamanan Pangan (x_b) sesuai tabel :</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Jumlah Sertifikasi dan registrasi Per tahun</th> <th>Tingkat capaian (x_b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>>1000</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>500 - ≤ 1000</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>250 - ≤ 500</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>100 - ≤ 250</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>50 - ≤ 100</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>20 - ≤ 50</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>< 20</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>		Jumlah Sertifikasi dan registrasi Per tahun	Tingkat capaian (x_b)	>1000	100%	500 - ≤ 1000	90%	250 - ≤ 500	70%	100 - ≤ 250	60%	50 - ≤ 100	50%	20 - ≤ 50	40%	< 20	20%
Jumlah Sertifikasi dan registrasi Per tahun	Tingkat capaian (x_b)																	
>1000	100%																	
500 - ≤ 1000	90%																	
250 - ≤ 500	70%																	
100 - ≤ 250	60%																	
50 - ≤ 100	50%																	
20 - ≤ 50	40%																	
< 20	20%																	
Sumber	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar																	